STATUS SOSIAL KEAGAMAAN EKS NARAPIDANA TERORIS

SKRIPSI

Oleh

Mohammad Izzun Nur

NIM. 200401110015

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

LEMBAR JUDUL

STATUS SOSIAL KEAGAMAAN EKS NARAPIDANA TERORIS

SKRIPSI

Diajukan kepada
Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)

Oleh
Mohammad Izzun Nur
NIM. 200401110015

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

STATUS SOSIAL KEAGAMAAN EKS NARAPIDANA TERORIS

SKRIPSI

Oleh

Mohammad Izzun Nur

NIM. 200401110015

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing	Tanda Tangan Persetujuan	Tanggal Persetujuan
Dosen Pembimbing 1 Muchamad Adam Basori, MA (TESOL). NIP. 198103122023211011		14/05 2025
Dosen Pembimbing 2 Dr. Mohammad Mahpur, M.Si. NIP. 197605052005011003		14/05 2025

Malang, 15 Mei 2025

Mengetahui,

Sekretaris Program Studi Psikologi (S1)

Yusuf Ratu Agung, MA

NIP. 198010202015031002

HALAMAN PENGESAHAN

STATUS SOSIAL KEAGAMAAN EKS NARAPIDANA TERORIS

Oleh

Mohammad Izzun Nur

NIM. 200401110015

Telah diujikan dan dinyatakan LULUS oleh Dewan Penguji Skripsi dalam Majelis Sidang Skripsi pada tanggal 16 Juni 2025

Dewan Penguji Skripsi:

Dosen Pembimbing	Tanda Tangan Persetujuan	Tanggal Persetujuan
Penguji Utama **Drs. H.Yahya,M.A** NIP. 196605181991031004		18/6 '25
Ketua Penguji **Dr. Fathul Lubabin Nuqul,M.Si** NIP. 197605122003121002		18/6 '25
Sekretaris Penguji **Muchamad Adam Basori, MA (TESOL).** NIP. 198103122023211011		17/6 '25

Disahkan oleh,

Dekan

Prof. Dr. Rifa Hidayah, M.Si

NIP. 197611282002122001

NOTA DINAS I

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah Skripsi berjudul:

STATUS SOSIAL KEAGAMAAN EKS NARAPIDANA TERORIS

Yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Izzun Nur

NIM : 20040110015

Program : S1 Psikologi

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Malang, 14 Mei 2025

Dosen Pembimbing 1

Muchamad Adam Basori, MA (TESOL).

NIP. 198103122023211011

NOTA DINAS II

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah Skripsi berjudul:

STATUS SOSIAL KEAGAMAAN EKS NARAPIDANA TERORIS

Yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Izzun Nur

NIM : 20040110015

Program : S1 Psikologi

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Malang, 14 Mei 2025

Dosen Pembimbing 2

Dr. Mohammad Mahpur, M.Si.

NIP. 197605052005011003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Izzun Nur

NIM : 200401110015

Fakultas : Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **STATUS SOSIAL KEAGAMAAN EKS NARAPIDANA TERORIS** adalah benar-benar hasil karya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari ada claim dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia mendapatkan sangsi

Malang, 2025

Penulis

Mohammad Izzun Nur

NIM. 200401110015

MOTTO

"*Kegagalan bukanlah kemenangan yang tertunda, kegagalan adalah kemenangan yang dimiliki oleh orang yang belum atau tidak mau mencoba"*

-Mohammad Izzun Nur-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil Aalamin, sujud serta Syukur kepada Allah SWT. Terima kasih atas Karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan maksimal. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Maslachah S.Pd.I dan M. Salim S.Ag. Kedua orang tua saya yang selalau mendo'akan serta memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa batas.
2. Moh. Irsyadul Khoir, Shofiyatul Hidayah, Izzatul Afidah dan Naila. Kedua saudara saya, kakak ipar dan keponakan saya yang akan selalu memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta selalu menemani saya di masa-masa sulit dalam kehidupan, termasuk dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Untuk dosen-dosen Psikologi yang senantiasa memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
4. Maharani Oryza Sativa S.Ked, orang baik yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan perkuliahan saya, dengan penuh kasih menyediakan waktu dan energi untuk mendukung saya dalam pengerjaan skripsi, memberikan dorongan motivasi, dan menenangkan saya saat merasa putus asa.
5. Mohammad Izzun Nur, diri saya sendiri. Terima kasih telah berjuang keras menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal. Terima kasih selalu berusaha kuat dan memberikan yang terbaik pada setiap usaha yang dilakukan. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam segala hiruk piruk dunia yang tidak selalu baik.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Status Sosial Keagamaan Eks Narapidana Teroris". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam menebar kebaikan dan perdamaian. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Muchamad Adam Basori, MA (TESOL)., selaku Dosen Pembimbing pertama pada penulisan skripsi ini.
4. Dr. Mohammad Mahpur, M.Si., selaku Dosen Pembimbing kedua pada penulisan skripsi ini.
5. Seluruh civitas akademika di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya selama peneliti menempuh Pendidikan S1 Psikologi.
6. Para mantan narapidana teroris yang senantiasa berbagi kasih pengalaman hidup.
7. Imam Fauzi Surahmat, selaku koordinator lingkaran survei Indonesia wilayah Jawa Timur yang memberikan banyak ilmu sosial masyarakat dan sosial politik.
8. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Lamongan se-Malang Raya dan Paguyuban warga Lamongan se-Malang Raya yang selalu menjalin tali silaturrahim sesama warga Lamongan yang merantau di Kota Malang.
9. Teman seperjuangan program studi S1 Psikologi, Terkhusus Noureel, Rania, Rima dan Nanda.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Malang, 14 Juni 2025
Penulis

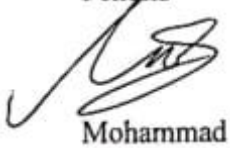

Mohammad Izzun Nur
NIM. 200401110015

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
NOTA DINAS I iv
NOTA DINAS II v
SURAT PERNYATAAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
خالصة xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 9
3. Tujuan Penelitian 9
4. Manfaat Penelitian 10
BAB II 11
KAJIAN TEORI 11
1. Tinjauan Literatur 11
2. Penelitian Terdahulu 22
3. Kerangka Berpikir 25
BAB III 28
METODE PENELITIAN 28
1. Jenis Penelitian 28

2. Desain Penelitian 29
3. Subjek Penelitian 30
4. Lokasi Penelitian 33
5. Sumber Data 33
6. Teknik Pengumpulan Data 35
7. Teknik Analisis Data 37
8. Keabsahan Penelitian 40
BAB IV 43
TEMUAN DAN PEMBAHASAN 43
1. Profil Subjek 43
2. Temuan Penelitian 44
3. Pembahasan 78
BAB V 88
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 88
1. KESIMPULAN 88
2. IMPLIKASI PENELITIAN 89
3. SARAN 95
DAFTAR PUSTAKA 98

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Reduksi Data 38
Tabel 3. 2 Display Data 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir..... 27
Gambar 3. 1 Model analisis interaktif..... 37
Gambar 5. 1 Proses Terbentuknya Status Sosial Keagamaan 78

ABSTRAK

Nur, Mohammad Izzun. 2025. Status Sosial Keagamaan Eks Narapidana Teroris. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini mengkaji status sosial keagamaan eks-narapidana teroris dan dinamika reintegrasi mereka ke masyarakat, dilatarbelakangi kompleksitas perubahan ideologi dan adaptasi sosial pasca-pembebasan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi penyebab perubahan pikiran dan cara pandang eks-napiter terhadap kelompok radikal, serta menganalisis proses atribusi mereka dalam reintegrasi sosial terkait status keagamaan.

Kerangka teoretis penelitian ini meliputi status sosial keagamaan untuk memahami posisi individu, persepsi diri untuk menggali pandangan mereka setelah deradikalisasi, disonansi kognitif untuk menjelaskan pendorong perubahan keyakinan, dan teori atribusi untuk menganalisis bagaimana eks-napiter memaknai keberhasilan atau tantangan reintegrasi.

Dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi naturalistik, penelitian ini menggali pengalaman mendalam para eks-napiter yang telah bebas. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan Model Interaktif Miles dan Huberman. Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan kunci. Pertama, perubahan ideologi eks-napiter dipicu refleksi diri mendalam dan disonansi kognitif, diperkuat oleh pembinaan agama moderat serta interaksi sosial positif. Kedua, dalam reintegrasi, eks-napiter cenderung mengatribusikan kesulitan (stigma) pada faktor eksternal namun keberhasilan pada upaya internal. Pembentukan identitas spiritual positif, partisipasi keagamaan, dan dukungan keluarga/komunitas menjadi strategi adaptasi esensial bagi penerimaan status sosial keagamaan mereka. Kesimpulan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam deradikalisasi dan reintegrasi untuk masyarakat yang lebih damai.

Kata Kunci: eks narapidana teroris, status sosial keagamaan, perubahan ideologi, reintegrasi, deradikalisasi.

ABSTRACT

Nur, Mohammad Izzun. 2025. *The Religious Social Status of Former Terrorist Convicts*. Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

This study examines the religious social status of former terrorist inmates and their reintegration dynamics into society, driven by the complex changes in ideology and social adaptation they undergo post-release. The research aims to identify the causes of former terrorist inmates' change in mindset and perspective towards radical groups, and analyze their attribution processes during social reintegration concerning their religious social status.

The theoretical framework includes religious social status to understand individual positions, self-perception theory to explore their post-deradicalization views, cognitive dissonance to explain ideological shift drivers, and attribution theory to analyze how ex-inmates interpret the causes of reintegration success or challenges.

Utilizing a qualitative method with a naturalistic phenomenological approach, this study explores the profound lived experiences of released former terrorist inmates. Data was collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman Interactive Analysis Model. Data validity was ensured through source, technique, and time triangulation.

The findings reveal two key conclusions. First, the ideological change in former terrorist inmates is triggered by deep self-reflection and cognitive dissonance, reinforced by moderate and inclusive religious guidance and positive social interactions. Second, during reintegration, ex-inmates tend to attribute difficulties (like stigma) to external factors but success in adaptation to internal efforts. Rebuilding a positive spiritual identity, participating in moderate religious activities, and leveraging family/community support are essential adaptation strategies for re-establishing their accepted religious social status. This study underscores the importance of a holistic approach in deradicalization and reintegration for a more peaceful society.

Keywords: former terrorist inmates, religious social status, ideological change, reintegration, deradicalization.

خالصة

،النّور, محمّد عزّ . ٢٠٢٥. الوضع الاجتماعي الديني للسجناء السابقين في قضايا الإرهاب. رسالة بكالوريوس كلية علم النفس، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

،الكلمات المفتاحية: السجناء السابقون في قضايا الإرهاب، الحالة الاجتماعية الدينية، تغير الإيديولوجيا

يدرس هذا البحث الوضع الاجتماعي الديني للسجناء الإرهابيين السابقين وديناميكيات إعادة دمجهم في .المجتمع، مدفوعًا بالتغيرات المعقدة في الأيديولوجية والتكيف الاجتماعي التي يمرون بها بعد الإفراج عنهم ويهدف البحث إلى (1) تحديد أسباب تغير عقلية ومنظور السجناء الإرهابيين السابقين تجاه الجماعات المتطرفة، و(2) تحليل عمليات الإسناد التي يمرون بها أثناء إعادة الاندماج الاجتماعي فيما يتعلق بوضعهم .الاجتماعي الديني

يتضمن الإطار النظري الوضع الاجتماعي الديني لفهم مكانة الأفراد، ونظرية الإدراك الذاتي لاستكشاف آرائهم بعد نزع التطرف، والتنافر المعرفي لشرح دوافع التحول الأيديولوجي، ونظرية الإسناد لتحليل كيفية .تفسير السجناء السابقين لأسباب نجاح إعادة الاندماج أو تحدياته

باستخدام المنهج النوعي ذي المدخل الفينومينولوجي الطبيعي، يستكشف هذا البحث التجارب المعيشية العميقة ،للسجناء الإرهابيين السابقين المفرج عنهم. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات شبه المنظمة والوثائق، ثم تم تحليلها باستخدام نموذج مايلز وهوبرمان التحليلي التفاعلي. تم ضمان صحة البيانات من خلال .التثليث (المصدر، والتقنية، والوقت)

تكشف النتائج عن استنتاجين رئيسيين. أولاً، ينجم التغيير الأيديولوجي لدى السجناء الإرهابيين السابقين عن التأمل الذاتي العميق والتنافر المعرفي، ويتعزز بالتوجيه الديني المعتدل والشامل والتفاعلات الاجتماعية الإيجابية. ثانيًا، أثناء إعادة الاندماج، يميل السجناء السابقون إلى إسناد الصعوبات (مثل الوصمة) إلى عوامل خارجية، ولكنهم يُسندون النجاح في التكيف إلى جهودهم الداخلية وتغيراتهم. إن إعادة بناء هوية روحية إيجابية، والمشاركة في الأنشطة الدينية المعتدلة، والاستفادة من دعم الأسرة والمجتمع هي استراتيجيات تكيف أساسية لإعادة ترسيخ وضعهم الاجتماعي الديني المقبول. يؤكد هذا البحث على أهمية النهج الشامل في نزع .التطرف وإعادة الاندماج من أجل مجتمع أكثر سلامًا

،الكلمات المفتاحية: سجناء إرهابيون سابقون، الوضع الاجتماعي الديني، التغيير الأيديولوجي، إعادة الاندماج .نزع التطرف

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Isu terorisme telah menjadi perhatian global dan nasional yang krusial dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini sangat kompleks dan multidimensi, menuntut pendekatan holistik dan integratif dalam penanganannya. Kompleksitas ini timbul karena terorisme memiliki dampak signifikan terhadap tatanan sosial-keagamaan, serta secara langsung mengancam keamanan dan ketahanan nasional. Di Indonesia, akar radikalisme dan terorisme memiliki sejarah panjang yang telah mewarnai berbagai era pemerintahan, mulai dari awal kemerdekaan hingga pasca-Reformasi. Terorisme di Indonesia sangat terkait dengan dimensi ideologis, historis, dan politis, yang tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis global dan domestik. Secara spesifik, banyak aksi terorisme di Indonesia dimotivasi oleh ideologi Islam radikal yang berupaya mendirikan negara Islam melalui kekerasan (Prayitno & Alfian, 2023) Namun, perlu dipahami bahwa selain ideologi, aksi-aksi ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang kompleks (Robbaniyah & Lina, 2022). Oleh karena itu, upaya penanganan terorisme tidak bisa hanya berfokus pada aspek keamanan semata, melainkan harus menyentuh akar permasalahan yang lebih dalam, termasuk dimensi sosial, ekonomi, dan ideologi.

Menelaah lebih jauh akar permasalahan radikalisme yang seringkali menjadi cikal bakal terorisme, Hafid (2020) mengemukakan bahwa radikalisme, atau 'al-tatharruf', timbul dari kombinasi empat faktor utama. Pertama, pemahaman agama yang parsial dan doktriner tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Kedua, interpretasi literal dan tekstual terhadap teks agama, mengabaikan dimensi historis

dan sosiologisnya. Ketiga, sikap ekstrem dalam mengharamkan banyak hal, yang justru menyulitkan umat dan bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam agama. Keempat, minimnya wawasan sejarah dan sosiologi, menyebabkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan sering kali bertentangan dengan kemaslahatan umum, akal sehat, dan tuntutan zaman. Kombinasi dari keempat faktor ini, merupakan akar permasalahan munculnya radikalisme yang pada akhirnya berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Penulis berargumen bahwa kurangnya kedalaman dan keluasan pemahaman keagamaan, serta ketidakmampuan mengaitkan ajaran agama dengan realitas sosial dan historis, menjadi pemicu utama gerakan radikal ini.

Dalam upaya penanggulangan terorisme, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai tindakan, salah satunya melalui operasi penindakan oleh Satgas Anti-Teror BNPT dan Densus 88 untuk mengungkap serta menangkap jaringan teroris (Mbai, 2014).. Para pelaku terorisme kemudian diadili berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 15 Tahun 2003. Pasca-hukuman, pelaksanaan UU ini dilanjutkan dengan program pembinaan dan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana teroris agar berpedoman pada ideologi NKRI sesuai amanat undang-undang. Pentingnya, upaya pembinaan ini tidak berhenti saat narapidana masih di dalam Lapas, melainkan terus berlanjut setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat.

Relevansi isu terorisme dan penanganannya di Indonesia juga mendapat pengakuan di kancah internasional. Pada tahun 2022, Kementerian Sosial Indonesia menerima kunjungan Menteri Kehakiman Kirgizstan, Aiaz Baetov. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengatasi terorisme dan radikalisme, khususnya dalam rehabilitasi Eks narapidana teroris.

Kirgizstan mengakui keahlian Indonesia dalam menangani gerakan teroris dan radikal, dan berharap pengalaman ini dapat membantu mereka menghadapi masalah serupa di negaranya (Ananda, 2022). Pengakuan internasional ini menegaskan bahwa pendekatan Indonesia dalam penanganan terorisme, terutama aspek rehabilitasi, menjadi sorotan dan rujukan penting, mendorong kita untuk lebih mendalami efektivitas program tersebut.

Salah satu elemen krusial dalam program rehabilitasi yang menarik perhatian tersebut adalah upaya reintegrasi sosial bagi eks narapidana teroris. Eks narapidana teroris adalah individu yang sebelumnya terlibat dalam aktivitas terorisme dan telah menjalani hukuman penjara (Salim, 2022). Kelompok ini seringkali menghadapi stigma sosial yang kuat (A. Kurniawan, 2023), dan setelah dibebaskan, mereka menghadapi tantangan besar dalam kembali serta mengintegrasikan diri ke masyarakat. Reintegrasi sosial bagi eks narapidana teroris adalah upaya krusial untuk memulihkan dan memfasilitasi penerimaan kembali mereka ke dalam masyarakat pasca-hukuman.

Upaya lanjutan setelah narapidana teroris keluar dari Lapas dikenal sebagai reintegrasi sosial, yaitu proses pemulihan mantan narapidana teroris melalui penyesuaian kembali dengan berbagai unsur sosial di masyarakat. Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang peran sentral dalam proses ini, berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang membimbing mantan narapidana agar hubungan mereka dengan masyarakat dapat pulih (Kellina, 2017). Selain pembinaan bagi individu, diperlukan pula upaya untuk mengubah paradigma masyarakat ke arah yang lebih moderat guna mencegah dampak negatif dan memfasilitasi penerimaan kembali mantan napiter. Strategi untuk mencapai moderasi ini mencakup pemahaman akan keniscayaan perbedaan sebagai karunia Tuhan, menjaga keseimbangan dalam

beragama agar tidak mudah menghakimi, dan menumbuhkan kasih sayang sebagai perekat interaksi sosial yang damai dan anti-radikalisme. Melalui upaya ini, paham-paham radikal dapat ditekan dan dibendung secara efektif (Zumrotus Sholikhah & Muvid, 2022). Namun, kompleksitas masalah ini tidak berhenti pada upaya-upaya tersebut, karena realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar yang kerap menghambat keberhasilan reintegrasi.

Meskipun berbagai upaya reintegrasi dilakukan, mantan narapidana teroris kerap menghadapi tantangan signifikan dari lingkungan sekitar setelah bebas dari penjara (Budiarsih, 2023). Salah satu contoh nyata adalah kasus seorang mantan narapidana teroris yang dilaporkan oleh ngopibareng.id pada 10 April 2018, harus berpindah kontrakan hingga lima kali karena pengusiran warga akibat statusnya. Selain itu, mereka juga menghadapi hambatan dalam mencari pekerjaan karena kesulitan memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana (Tejo, 2018). Persepsi masyarakat yang menganggap teroris, bahkan keluarganya, sebagai entitas yang berbeda, menempatkan mantan narapidana teroris pada risiko tinggi mengalami stigma negatif terkait status sosial mereka (Hidayat & Husna, 2021). Dapat terlihat bahwa status sosial mantan napiter di mata masyarakat menjadi rintangan utama dalam proses pemulihan dan reintegrasi eks narapidana teroris.

Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif aparat penegak hukum yang esensial dalam upaya pencegahan radikalisme. Pentingnya peran mahasiswa dan masyarakat dalam membendung paham-paham radikal, intoleransi, dan terorisme di lingkungan pendidikan, seperti yang ditekankan oleh Bripka Purnomo Budi Setiyawan menegaskan bahwa penanganan isu ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata (Alex, 2022). Hal ini menunjukkan urgensi peran serta masyarakat dalam mendukung reintegrasi dan

mencegah stigma, suatu aspek yang juga menjadi perhatian utama dalam studi-studi terdahulu terkait penanganan terorisme.

Penelitian ini juga mendasari kajian pada Teori Budaya Kehormatan tradisional oleh Henry (Waytz, 2009), yang menunjukkan keterkaitan erat dengan topik status sosial. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan status sosial dapat memicu kecenderungan perilaku yang berbeda, terutama dalam konteks kekerasan. Kelompok dengan status sosial rendah, seperti minoritas etnis, cenderung lebih waspada dan sensitif terhadap ancaman penolakan sosial. Reaksi kekerasan dapat muncul sebagai mekanisme perlindungan harga diri mereka. Dalam kasus eks narapidana teroris, dapat diasumsikan bahwa status sosial-keagamaan mereka di masyarakat juga cenderung rendah. Sebagai mantan narapidana terorisme, mereka seringkali dipandang sebagai kelompok marginal yang berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat (Sholeh et al., 2018). Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, membuat mereka lebih waspada dan reaktif terhadap penolakan sosial (Jabbar, 2022). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai status sosial-keagamaan eks narapidana teroris sangat penting. Kajian ini dapat memberikan wawasan mengenai dinamika psikologis dan kecenderungan perilaku mereka, yang krusial untuk upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang lebih efektif. Dengan mempertimbangkan faktor status sosial, pendekatan yang lebih tepat dapat dirancang untuk memfasilitasi penerimaan dan adaptasi mereka di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Lestari, (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa paradigma sosial dan keagamaan individu dapat mempengaruhi perspektif dan tindakan mereka di Masyarakat. Sejalan dengan hal itu, sikap moderasi beragama atau moderasi Islam merupakan sikap hidup yang berada di tengah, tidak cenderung ke arah yang ekstrem, baik ke kiri, kanan, depan, maupun belakang. Sikap moderat ini memungkinkan

seseorang untuk melihat dan menyelesaikan permasalahan secara seimbang. Pada akhirnya, tujuan dari moderasi beragama adalah untuk menciptakan suasana yang toleran, damai, dan harmonis di tengah kemajemukan agama dan budaya yang ada di Masyarakat (Dodego & Witro, 2020). Relevansi ini krusial karena moderasi beragama dalam masyarakat dapat menumbuhkan iklim penerimaan yang lebih baik bagi eks narapidana teroris, mengurangi stigma, dan mendukung proses reintegrasi.

Untuk memahami lebih dalam tantangan reintegrasi, penelitian ini berfokus pada konsep status sosial keagamaan Eks Narapidana Teoris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012), status diartikan sebagai keadaan atau kedudukan individu dalam hubungan dengan masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut, Soekanto & Sulistyowati (2017) mendefinisikan status sosial sebagai posisi seseorang dalam masyarakat yang melibatkan interaksi, prestise, hak, dan kewajiban (Soekanto, 2009). Dalam konteks keagamaan, status individu juga berkaitan dengan posisinya dalam kelompok keagamaan mayoritas atau minoritas, yang pada gilirannya mempengaruhi peran sosialnya. Peranan sendiri merupakan konsekuensi dari kedudukan atau status sosial-keagamaan seseorang, namun cara peranan itu dibawakan dapat bervariasi tergantung kepribadian dan pengalaman individu. Dengan demikian, status sosial keagamaan eks narapidana teroris mencerminkan posisi kompleks mereka di masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan konsep *internal attribution*, yaitu kecenderungan individu untuk menjelaskan perilaku atau hasil berdasarkan faktor internal seperti kemampuan, usaha, atau karakteristik pribadi (Lekhawipat et al., 2018). Individu dengan *internal attribution* yang kuat diharapkan lebih mampu menerima dan menjalankan program pembinaan, serta menunjukkan tanggung jawab dalam proses pemulihan dan penerimaan kembali oleh

masyarakat. Dengan demikian, *internal attribution* dapat menjadi faktor protektif yang signifikan dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial eks narapidana teroris. Dengan demikian, internal attribution dapat menjadi faktor protektif yang signifikan dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial eks narapidana teroris.

Perubahan cara pandang dan adaptasi eks narapidana teroris merupakan proses psikologis yang kompleks dan dapat dijelaskan melalui beberapa teori kognitif. Salah satunya adalah disonansi kognitif, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Leon Festinger (1957). Disonansi kognitif terjadi ketika seseorang memiliki dua atau lebih keyakinan, ide, atau nilai yang saling bertentangan atau tidak konsisten. Misalnya, ketika seorang individu yang dulunya sangat meyakini ideologi radikal dihadapkan pada realitas atau informasi baru yang bertentangan dengan keyakinan lamanya, seperti dampak negatif terorisme atau nilai-nilai moderat masyarakat, mereka akan mengalami ketidaknyamanan psikologis. Untuk mengurangi disonansi ini, individu mungkin akan mengubah salah satu keyakinan, perilaku, atau mencari informasi baru untuk membenarkan salah satu keyakinan tersebut (Festinger, 1957; H. Jones & Mills, 1999). Sebaliknya, konsonansi kognitif merujuk pada keadaan di mana keyakinan, nilai, dan perilaku individu konsisten dan selaras, menciptakan kenyamanan psikologis (Ramadanti et al., 2022). Proses ini krusial dalam deradikalisasi, di mana tujuan utamanya adalah membantu eks napiter mencapai konsonansi baru yang sejalan dengan nilai-nilai non-kekerasan dan NKRI.

Lebih lanjut, proses reintegrasi sosial dapat dipahami melalui konsep asimilasi. Jean Piaget (1936) mengemukakan asimilasi sebagai proses di mana individu menginterpretasikan informasi baru ke dalam kerangka kognitif yang sudah ada (Piaget, 1952). Dalam konteks eks narapidana teroris, asimilasi terjadi ketika mereka mencoba

mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat dengan mengadopsi norma, nilai, dan perilaku yang berlaku, yang mungkin berbeda dari norma kelompok radikal mereka sebelumnya. Proses ini melibatkan penyesuaian mental dan perilaku agar dapat diterima dan berfungsi dalam lingkungan sosial yang baru (Berry, 2005). Memahami bagaimana eks narapidana teroris mengalami disonansi saat menghadapi realitas baru, berupaya mencapai konsonansi dengan nilai-nilai moderat, dan mengasimilasi diri ke dalam masyarakat, menjadi kunci untuk memahami perubahan cara pandang dan proses adaptasi mereka dalam reintegrasi sosial.

Fenomena terorisme terus menjadi fokus kajian ilmiah yang menarik, mendorong berbagai peneliti untuk mengungkap dimensinya. Beberapa studi sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman ini. Misalnya, Putra & Rulloh (2023) menyimpulkan bahwa pencegahan dan penanggulangan terorisme memerlukan kerja sama komprehensif, tidak hanya dari aparat tetapi juga dukungan kepedulian masyarakat. (Paamsyah et al., 2023) menekankan urgensi metode penanggulangan terorisme yang efektif secara intelektual, melampaui batasan hukum dan politik. Syihab & Hatta (2021) menyoroti pentingnya pendekatan kepemimpinan yang beragam dalam menghadapi isu keamanan global, sementara Syafriz et al. (2021) merumuskan konsep baru terorisme yang tidak hanya terbatas pada gerakan militan Muslim. Selain itu, Lukman (2021) menegaskan bahwa tindakan terorisme adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mengganggu kedaulatan NKRI. Namun, meskipun berbagai penelitian ini telah membahas aspek pencegahan, penanggulangan, dan definisi terorisme, masih terdapat celah penelitian yang spesifik mengenai pengalaman reintegrasi eks narapidana teroris dari sudut pandang perubahan cara pandang internal dan status sosial-keagamaan mereka pasca-pembebasan. Penelitian sebelumnya belum secara mendalam mengkaji bagaimana mantan napiter beradaptasi dan direspon oleh

masyarakat sekitarnya, serta peran internal attribution dalam proses tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam perubahan cara pandang dan persepsi diri eks narapidana teroris dalam melepaskan diri dari kelompok radikal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap fakta mengenai status sosial-keagamaan para eks narapidana teroris pasca-pembebasan, termasuk tantangan adaptasi dan strategi mereka dalam menghadapi respons masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pengembangan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang lebih efektif bagi mantan narapidana teroris. Pemahaman mengenai status sosial-keagamaan eks narapidana teroris ini krusial untuk mencegah kambuhnya radikalisme dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat secara menyeluruh.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

a. Bagaimana faktor-faktor yang mendorong perubahan ideologi eks narapidana teroris?
b. Bagaimana proses atribusi eks narapidana teroris dalam reintegrasi ke masyarakat?

3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan pikiran eks narapidana teroris.
b. Mendeskripsikan proses atrivusi eks narapidana teroris mengenai reintegrasi ke masyarakat.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Mengembangkan pemahaman teoritis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan mindset dan perspektif mantan narapidana teroris terhadap kelompok radikal.
2) Memperkaya pemahaman teoritis mengenai status sosial keagamaan mantan narapidana teroris dan implikasinya dalam proses reintegrasi kemasyarakatan.

b. Manfaat Praktis

1) Memberikan mengidentifikasi titik-titik intervensi yang efektif untuk memfasilitasi proses deradikalisasi narapidana teroris.
2) Membantu mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat dioptimalkan dalam proses reintegrasi mantan narapidana teroris ke dalam masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Literatur

a. Status Sosial Keagamaan Eks Narapidana Teroris

1) Definisi Status Sosial Keagamaan

Status sosial merujuk pada kedudukan atau posisi individu dalam masyarakat, meliputi hubungan sosial, lingkungan pergaulan, prestise, serta hak dan kewajiban yang melekat padanya (Soekanto & Sulistyowati, 2017). Kedudukan ini seringkali dibentuk oleh berbagai unsur seperti pekerjaan, sistem kekerabatan, jabatan, dan agama yang dianut. Pentingnya status dalam interaksi sosial juga ditekankan oleh Abdulsyani (2012), yang menyatakan bahwa dalam pergaulan, individu seringkali berinteraksi berdasarkan status daripada mengenal pribadi secara mendalam. Sementara itu, 'keagamaan' berkaitan dengan tindakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keyakinan agama untuk menciptakan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari (Najtama, 2018). Hubungan antara status sosial dan agama sangat erat, terutama dalam masyarakat yang sangat menjunjung nilai-nilai keagamaan. Agama tidak hanya membentuk pandangan dunia individu, tetapi juga memengaruhi norma, nilai, dan praktik sosial yang pada gilirannya membentuk status seseorang di komunitas. Status keagamaan dapat memberikan legitimasi sosial, otoritas, atau bahkan stigmatisasi, tergantung pada interpretasi dan penerimaan masyarakat terhadap keyakinan atau afiliasi keagamaan individu.

Dengan demikian, status sosial keagamaan dapat diartikan sebagai fenomena sosial yang menunjukkan bagaimana hubungan antarindividu dan komunitas dalam masyarakat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keagamaan yang mereka anut. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai status sosial keagamaan sangat relevan untuk menganalisis posisi dan peran eks-narapidana teroris di

masyarakat setelah mereka menjalani proses deradikalisasi, serta bagaimana aspek keagamaan mereka memengaruhi reintegrasi sosialnya. Hal ini penting untuk melihat apakah status keagamaan mereka berubah, tetap stigmatis, atau bahkan menjadi jalan bagi penerimaan kembali di lingkungan sosialnya.

2) Macam-macam status sosial

Menurut Soekanto & Sulistyowati (2017) terdapat dua macam status sosial yang umum dikenal, yaitu:

a) *Ascribed Status*: Kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diperoleh tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Status ini diperoleh sejak lahir, seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan sebagainya. Ascribed Status diperoleh tanpa usaha yang signifikan dari individu .
b) *Achieved Status*: Status sosial diperoleh seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Status ini dapat diusahakan, misalnya melalui pendidikan atau prestasi kerja. Orang yang memiliki achieved status biasanya memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan ascribed status.

Bagi eks narapidana terorisme, status mereka sebagai "eks narapidana teroris" dapat dianggap sebagai bentuk ascribed status negatif yang diperoleh dari pengalaman masa lalu mereka, terlepas dari upaya deradikalisasi yang telah mereka jalani. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial dan keagamaan. Namun, upaya-upaya mereka untuk kembali ke masyarakat, beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku, dan bahkan berkontribusi positif, dapat dikategorikan sebagai usaha untuk mencapai achieved status baru. Proses pemulihan eks narapidana teroris melalui penyesuaian unsur sosial yang berbeda dalam masyarakat merupakan bentuk reintegrasi, di mana mereka berusaha mendapatkan *achieved status* pasca-

pembebasan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana eks narapidana teroris berupaya membangun Kembali *achieved status* mereka, khususnya dalam konteks status sosial keagamaan, setelah menghadapi stigma dari *ascribed status* mereka sebagai mantan pelaku terorisme.

b. Persepsi Diri dalam Konteks Perubahan Ideologi Eks Narapidana Teroris

Teori persepsi diri (*Self perception theory*) dikemukan pertama kali oleh Daryl J. Bem (1967) teori persepsi diri ini merupakan turunan dari teori konsep diri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Daryl Bem menyatakan persepsi diri secara sederhana berarti bahwa seseorang membuat kesimpulan diri sendiri sesuai cara berfikir dan pengalaman dengan mengamati perilaku orang lain (Scott, 2008). Dapat disimpulkan bahwa Teori Persepsi Diri menggambarkan kecenderungan individu untuk memahami sikap melalui pengamatan dan perilaku kita sendiri. Menurut Daryl Benn, ketika kita menilai pendapat sendiri maka kita akan mengambil perilaku kita sebagai petunjuk. Dengan persepsi, seorang individu dapat menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar diri individu, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Karena dalam persepsi itu merupakan aktivitas yang integrated, maka apa yang ada dalam diri individu seperti pengalaman, kemampuan berfikir, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Scott, 2008).

Persepsi diri merupakan cara seseorang memandang dan mengevaluasi dirinya sendiri secara menyeluruh, hal ini mencakup keyakinan tentang nilai-nilai, kemampuan dan citra diri (Ranny et al., 2017). Seseorang dengan persepsi diri yang positif dapat memberikan

dampak yang signifikan pada kesejahteraan psikologis (Santoso & Satwika, 2019). Begitu juga sebaliknya, seseorang dengan persepsi diri yang negatif, yakni pandangan dan penilaian yang buruk terhadap dirinya sendiri, dapat menjadi faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan timbulnya berbagai masalah psikologis (Nur Afifa et al., 2023).

Dalam konteks eks narapidana terorisme, teori persepsi diri sangat krusial untuk memahami bagaimana mereka mulai memandang dan mengevaluasi diri mereka sendiri setelah terlibat dalam tindakan terorisme dan menjalani hukuman. Proses deradikalisasi seringkali melibatkan perubahan mendalam dalam keyakinan ideologis, yang pada gilirannya akan memengaruhi persepsi diri mereka. Mengacu pada simpulan teori persepsi diri yang menyatakan bahwa individu memahami sikap melalui pengamatan dan perilaku diri sendiri, eks narapidana terorisme akan mulai membentuk persepsi diri baru berdasarkan perilaku mereka pasca-pembebasan, seperti partisipasi dalam program pembinaan, interaksi dengan masyarakat, dan upaya untuk menjauh dari ideologi radikal. Dengan memahami persepsi diri para mantan narapidana, peneliti dapat mengetahui faktor-faktor internal yang mendorong perubahan sikap mereka, apakah karena munculnya kesadaran moral, rasa bersalah, keinginan untuk memperbaiki diri, atau karena pengalaman dan refleksi pribadi yang mengubah keyakinan ideologis mereka. Seseorang dengan persepsi diri yang positif dapat memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan psikologis, yang sangat penting bagi eks narapidana terorisme dalam proses reintegrasi mereka. Sebaliknya, persepsi diri yang negatif dapat memperburuk masalah psikologis yang mungkin sudah ada, sehingga menghambat proses deradikalisasi dan reintegrasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana eks narapidana terorisme membangun dan mengubah persepsi diri mereka menjadi kunci dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi yang efektif.

c. Peran Disonansi Kognitif dalam Proses Deradikalisasi Eks Narapidana Teroris

Cognitive Dissonance Theory (DCT) atau Teori Disonansi Kognitif adalah teori yang menjelaskan tentang perasaan tidak nyaman yang dimiliki seseorang ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui, atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri (Amalia, 2022). Teori ini ditemukan oleh Leon Festinger pada tahun 1957 dan disonansi sendiri berarti ketidakseimbangan, yang merupakan lawan kata dari konsonansi yang berarti seimbang (Harmon-Jones & Mills, 2019). Disonansi kognitif adalah keadaan psikologis yang terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan, sikap, atau perilaku seseorang.

Disonansi kognitif memberikan dampak seseorang unruk menolak, merasionalisasi, atau menghindari informasi yang bertentangan dengan keyakinannya, sehingga dapat membuat kita mengambil keputusan yang buruk (Ent & Gerend, 2016). Hal ini karena kita tidak menolak informasi karena informasi tersebut salah, melainkan karena kenyataan yang ada membuat kita merasa tidak nyaman.

Psikolog Amerika Leon Festinger (1957) menawarkan tiga penjelasan mengapa seseorang mungkin tidak mau mengubah keyakinan atau perilakunya karena adanya informasi baru yang bertentangan (Harmon-Jones & Mills, 2019):

1) **"***The change may be painful or involve loss***."** Dapat dipahami bahwa mengubah sikap dan tindakan kita bisa jadi sulit—terutama jika hal tersebut sudah tertanam kuat di dalam diri kita.
2) **"***The present behavior may be otherwise satisfying***."** Pernyataan ini mengacu pada situasi di mana perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang saat ini dapat memberikan kepuasan atau kenikmatan sesaat.

3) **"***Making the change may simply not be possible***."** Pernyataan ini mengungkapkan suatu tantangan atau hambatan yang sering dihadapi ketika seseorang ingin membuat perubahan dalam hidupnya.

Dalam konteks eks narapidana terorisme, teori disonansi kognitif sangat relevan untuk memahami perubahan ideologi dan sikap mereka. Eks narapidana terorisme kemungkinan besar mengalami disonansi kognitif yang kuat ketika keyakinan radikal mereka bertentangan dengan realitas kehidupan di penjara, informasi baru yang mereka terima, atau konsekuensi negatif dari tindakan mereka. Sesuai dengan penjelasan teori Ent & Gerend (2016) perasaan tidak nyaman akibat ketidaksesuaian ini (disonansi) dapat mendorong mereka untuk menolak atau merasionalisasi informasi yang bertentangan dengan keyakinan lama mereka.

Namun, disonansi kognitif juga dapat menjadi pendorong perubahan. Ketika disonansi mencapai tingkat yang tidak tertahankan, individu dapat berusaha menguranginya dengan mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku mereka. Bagi eks narapidana terorisme, ini berarti mempertanyakan ideologi lama dan membuka diri terhadap pandangan baru. Tantangannya adalah, seperti yang dijelaskan Festinger, mengubah keyakinan yang sudah tertanam kuat bisa menyakitkan atau melibatkan kehilangan (Harmon-Jones & Mills, 2019). Perilaku radikal mungkin pernah memberikan kepuasan atau tujuan sesaat *("The present behavior may be otherwise satisfying"*), sehingga sulit ditinggalkan. Terlebih lagi, terkadang perubahan itu sendiri terasa tidak mungkin dilakukan *("Making the change may simply not be possible")*. Dalam penelitian ini, disonansi kognitif dimaksudkan untuk melihat bagaimana eks narapidana teroris menentukan sikap tentang persepsi dirinya, yang pada akhirnya akan memengaruhi kesediaan mereka untuk menerima proses deradikalisasi dan reintegrasi ke masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang disonansi kognitif membantu menjelaskan mengapa sebagian eks

narapidana terorisme berhasil mengubah pandangan mereka, sementara yang lain mungkin masih bergumul dengan keyakinan lamanya.

d. Teori Atribusi dalam Pemahaman Perilaku Eks Narapidana Teroris

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958). Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang mencari tahu mengapa orang lain berperilaku seperti yang mereka lakukan. Fritz Heider mengembangkan teori atribusi yang membedakan antara internal attribution dan external attribution. Menurutnya, perilaku seseorang dapat dijelaskan oleh kombinasi faktor internal (kemampuan, usaha) dan faktor eksternal (kesulitan, keberuntungan). Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita memahami tingkah laku kita dan orang lain (Pasaribu & Wijaya, 2017). Dengan demikian, teori Heider menjadi fondasi utama dalam memahami bagaimana individu secara dasar menginterpretasikan dan menjelaskan kausalitas dalam perilaku sosial.

Pengembangan lebih lanjut dari kerangka dasar yang diletakkan oleh Heider dilakukan oleh Kelley, (1973) dengan menjelaskan informasi yang digunakan individu dalam membuat skema kausal. Skema kausal adalah asumsi atau konsepsi tentang cara dua atau lebih faktor kausal berinteraksi dalam kaitannya dengan efek tertentu yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya. Skema ini memungkinkan individu untuk membuat atribusi kausal secara cepat dan efisien meskipun dengan informasi yang terbatas, seperti skema penyebab ganda yang cukup (*multiple sufficient cause schema*) atau skema penyebab ganda yang perlu (*multiple necessary cause schema*). Dengan demikian, Kelley memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis dan terperinci untuk memahami bagaimana individu menganalisis dan menyimpulkan

penyebab perilaku, baik dalam konteks informasi yang melimpah maupun terbatas, yang melengkapi pemahaman dasar yang telah diberikan oleh Heider. Meskipun demikian, pada intinya, proses atribusi selalu bermuara pada penentuan apakah penyebab suatu perilaku atau peristiwa lebih bersifat internal pada individu atau eksternal pada situasi. Untuk memahami lebih jauh bagaimana atribusi ini dibentuk dan dampaknya, penting untuk mengkaji lebih dalam konsep *Internal Attributions* dan *External Attibutions* yang menjadi inti dari teori atribusi.

1) *Internal Attributions*

Internal attribution adalah konsep yang terkait dengan proses penilaian individu terhadap penyebab perilaku atau peristiwa yang dialami (Utama & Rohman, 2023). Dalam internal attribution, individu cenderung mengatribusikan perilaku atau hasil ke faktor internal, seperti karakteristik pribadi, kemampuan, atau motivasi, daripada ke faktor eksternal. Beberapa aspek yang terkait dengan *internal attribution* meliputi:

a) Stabilitas: pada sejauh mana faktor internal bersifat tetap atau stabil. Misalnya, jika seseorang berhasil dalam ujian, *internal attribution* akan mengaitkannya dengan kecerdasan atau kemampuan yang stabil.
b) Kontrolabilitas: Terkait dengan sejauh mana individu merasa memiliki kendali atas faktor internal. Jika seseorang gagal dalam tugas, internal attribution akan mencari faktor yang dapat dikendalikan, seperti usaha atau keterampilan.
c) Spesifisitas: Menyelidiki sejauh mana atribusi internal berlaku hanya untuk situasi tertentu. Misalnya, jika seseorang berhasil dalam olahraga, *internal attribution* mungkin terkait dengan keterampilan atletik yang spesifik.

Internal attributions mengacu pada penjelasan yang menekankan faktor-faktor internal atau karakteristik individu sebagai penyebab

perilaku atau peristiwa (Insan, 2023). Berikut adalah beberapa faktor internal yang memengaruhi atribusi internal:

a) Kemampuan (*Ability*): Individu cenderung mengatribusikan keberhasilan atau kegagalan mereka pada kemampuan pribadi. Misalnya, jika seseorang berhasil dalam ujian, mereka mungkin mengaitkannya dengan kecerdasan atau keterampilan akademik mereka.
b) Motivasi (*Motivation*): Tingkat motivasi individu memainkan peran penting dalam atribusi internal. Jika seseorang mencapai tujuan karena motivasi yang kuat, mereka mungkin mengaitkannya dengan faktor internal seperti tekad dan semangat.
c) Sifat Pribadi (Personality Traits): Karakteristik kepribadian, seperti ketekunan, optimisme, atau ketegasan, memengaruhi cara individu mengartikan peristiwa. Orang dengan atribusi internal mungkin melihat sifat pribadi mereka sebagai faktor penentu dalam pencapaian mereka.
d) Pengalaman Hidup (*Life Experiences*): Pengalaman masa lalu, baik positif maupun negatif, dapat membentuk atribusi internal. Misalnya, jika seseorang memiliki pengalaman sukses sebelumnya, mereka mungkin lebih cenderung mengaitkan keberhasilan masa kini dengan faktor internal.
e) Karakteristik Fisik (*Physical Characteristics*): Aspek fisik, seperti penampilan atau kesehatan, juga memengaruhi atribusi internal. Orang mungkin menghubungkan penampilan fisik mereka dengan kepercayaan diri dan pencapaian.

2) *External Attributions*

Atribusi eksternal adalah konsep yang menunjukkan bahwa penyebab suatu peristiwa terjadi murni karena faktor di luar individu yang diamati (Insan, 2023). Dengan kata lain, atribusi eksternal menunjukkan bahwa individu tidak secara pribadi bertanggung jawab atas perilaku atau hasilnya. Atribusi eksternal adalah konsep psikologis

yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan dan mengatribusikan penyebab peristiwa atau perilaku kepada faktor-faktor eksternal di luar diri mereka. Berikut beberapa aspek terkait atribusi eksternal.

Atribusi eksternal berbeda dengan atribusi internal di mana individu mengatribusikan keberhasilan atau kegagalan berdasarkan faktor-faktor di luar kendali mereka, bukan berdasarkan sifat dan kualitas disposisional. Dengan lebih berfokus pada atribusi eksternal, seseorang cenderung melihat dunia melalui perspektif lingkungan dan menyadari berbagai insiden biasanya terjadi karena alasan luar yang unik (Sus, 2023).

Dalam teori atribusi, terdapat dua jenis atribusi eksternal (Maryam, 2021):

a) Atribusi Situasional: Ini terjadi ketika kita mengatribusikan perilaku seseorang pada faktor situasional atau lingkungan. Contohnya, jika seseorang berbicara kasar pada kita karena sedang stres, kita mungkin akan mengatribusikannya pada situasi yang sulit.
b) Atribusi Normatif: Ini terjadi ketika kita menghubungkan perilaku seseorang dengan norma sosial atau budaya yang berlaku. Misalnya, dalam budaya tertentu, perilaku tertentu dianggap sopan karena norma-norma budaya.

Dalam konteks eks narapidana terorisme, teori atribusi sangat penting untuk memahami bagaimana mereka menjelaskan perilaku radikal masa lalu mereka sendiri, serta bagaimana mereka menginterpretasikan reaksi masyarakat terhadap mereka pasca-pembebasan. Saat menjalani proses reintegrasi, eks narapidana terorisme akan melakukan atribusi terhadap pengalaman mereka. Jika mereka cenderung melakukan internal attribution, mereka mungkin akan mengaitkan tindakan terorisme mereka di masa lalu dengan faktor-faktor

pribadi seperti pilihan yang salah, kurangnya pemahaman agama yang benar, atau kelemahan karakter. Atribusi internal ini, yang mencakup aspek kemampuan, motivasi, dan sifat pribadi, diharapkan dapat mempermudah mereka dalam menerima dan menjalankan program pembinaan serta lebih bertanggung jawab dalam upaya pemulihan dan penerimaan kembali oleh masyarakat. Sebaliknya, jika mereka cenderung melakukan *external attribution*, mereka mungkin akan menyalahkan faktor di luar diri mereka, seperti tekanan kelompok, kondisi sosial-ekonomi yang sulit, atau propaganda yang menyesatkan. Atribusi eksternal, baik situasional maupun normatif, dapat menghambat proses deradikalisasi karena individu tidak merasa bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka.

Setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, eks narapidana menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar ketika menjalani kehidupan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga hal ini mempengaruhi peranannya dalam status sosial. Teori atribusi akan membantu menganalisis bagaimana eks narapidana terorisme mengatribusikan tantangan ini apakah mereka melihatnya sebagai akibat dari stigma masyarakat (*external attribution*) atau sebagai konsekuensi dari tindakan masa lalu yang harus mereka pertanggungjawabkan (*internal attribution*). Dengan memahami bagaimana eks narapidana terorisme melakukan atribusi terhadap pengalaman mereka dalam reintegrasi, baik secara atribusi internal maupun eksternal, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat proses deradikalisasi dan reintegrasi, serta merancang intervensi yang lebih efektif. Dengan demikian, teori atribusi menyediakan kerangka kerja penting untuk menganalisis bagaimana individu memahami penyebab perilaku, yang secara langsung memengaruhi proses deradikalisasi dan reintegrasi ke masyarakat.

2. Penelitian Terdahulu

Putra & Rulloh (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Model Kepemimpinan Strategis Dalam Menghadapi Radikalisme Dan Terorisme" menyimpulkan bahwa pencegahan dan penanggulangan terorisme membutuhkan suatu kejasama secara menyeluruh. Selain kualitas dan kuantitas aparat yang telah dibentuk pemerintah juga perlu adanya dukungan terhadap kepedulian masyarakat. Dalam upaya melawan kejahatan terorisme, metode yang digunakan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi strategi baru untuk mengatasi kejahatan ini. Salah satu strategi alternatif adalah mengikuti aliran dana (follow the money) untuk memutus mata rantai pendanaan terorisme sesuai dengan undang-undang No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan kejahatan terorisme. Permasalahan radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme masih menarik untuk dibahas, terutama di Indonesia. Penyebab terorisme di Indonesia meliputi etnis, radikalisme agama, dan kemiskinan. Salah satu solusi alternatif untuk mencegah radikalisme yang berujung pada terorisme adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik, baik oleh individu, kelompok masyarakat, maupun pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan umum.

Paamsyah et al. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia" menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme dengan metode intelektual yang efektif yang melampaui hukum dan politik sangat diperlukan. Terorisme telah menjadi permasalahan serius di Indonesia setelah serangan teroris di Bali pada November 2002. Dalam kondisi saat ini, di mana Indonesia masih menghadapi risiko serangan militan dengan jaringan baru dan lebih banyak ahli bom, pemerintah Indonesia berupaya melawan terorisme. Langkah-langkah yang diambil meliputi pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dan satuan khusus, serta penyerbuan terhadap

tempat persembunyian pelaku terorisme. Penelitian lanjutan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam melawan terorisme memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang sangat berharga, terutama dalam kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan keagamaan. Analisis mendalam tentang efektivitas langkah-langkah yang telah diambil, seperti pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dan satuan khusus, dapat membantu mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan atau penguatan

Syihab & Hatta (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia" memberikan wawasan penting tentang pentingnya pendekatan kepemimpinan yang beragam dalam menghadapi isu-isu keamanan global yang kritis ini. penelitian ini membahas strategi komprehensif pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Strategi ini mencakup upaya-upaya preventif dan represif untuk menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang. Sebuah area penting yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana faktor-faktor sosial dan keagamaan mempengaruhi dinamika radikalisasi dan perkembangan kelompok teroris di Indonesia. Penelitian ini dapat menelusuri keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, serta afiliasi dan kepercayaan keagamaan dengan kecenderungan individu untuk terlibat dalam aktivitas terorisme. Analisis mendalam terhadap profil dan latar belakang pelaku teror dapat mengungkap pola-pola yang menjadi pendorong utama bagi mereka untuk bergabung dengan jaringan militan.

Syafriz et al., (2021) Dalam penelitiannya yang berjudul "Sorotan Perkembangan Terorisme Moden: Analisis Hubungan Terorisme Baharu dengan Gerakan Militan Muslim", membahas upaya untuk mengurangi radikalisme pada narapidana teroris melalui perlakuan individu terhadap mereka. Penelitian ini menganalisis hubungan antara konsep terorisme baru dan gerakan militan Muslim dalam kerangka teori terorisme. Dengan

memeriksa keterkaitan antara terorisme baru dan gerakan militan Islam, artikel ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana perlakuan individu terhadap narapidana teroris dapat mempengaruhi deradikalisasi mereka. Analisis ini dapat membantu memahami dinamika yang mendasari radikalisme di kalangan narapidana teroris dan upaya-upaya yang efektif untuk menguranginya. Peninjauan terhadap perkembangan terorisme modern juga dapat memberikan konteks yang berguna bagi penelitian tentang status sosial keagamaan mantan narapidana teroris. Kaitannya dalam konteks status sosial keagamaan pada penelitian ini yaitu diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana perlakuan individu terhadap mereka memengaruhi pandangan mereka mengenai agama dan radikalisme. Dalam penelitian ini akan membandingkan temuan tentang status sosial keagamaan eks narapidana dengan perkembangan terbaru dalam terorisme yang dianalisis dalam penelitian terdahulu. Peneliti diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana status sosial keagamaan dapat memengaruhi potensi radikalisasi dan upaya deradikalisasi.

Lukman (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara Dari Terorisme" menyebutkan bahwa Tindakan terorisme merupakan sebuah tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan juga mengganggu kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk di bawah kerangka PBB. Indonesia mengimplementasikan 4 pilar United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS). Ini mencakup pencegahan, penegakan hukum, penanganan korban, dan kerjasama internasional. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, perlu dilakukan telitian lebih lanjut mengenai bagaimana lingkungan masyarakat memengaruhi status sosial keagamaan narapidana teroris. Faktor-faktor seperti program pembinaan, interaksi dengan petugas, dan kehidupan sehari-hari di dalam penjara dapat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan keyakinan

mereka. Sebuah analisis mendalam tentang dinamika ini dapat membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang dapat memperkuat atau menghambat proses deradikalisasi.

Lekhawipat et al. (2018) dalam penelitiannya, membahas tentang pengaruh internal attributions terhadap perilaku berbagi pengetahuan di berbagai ukuran perusahaan. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan organisasi dan teknologi yang memengaruhi pengaruh negatif internal attributions pada perilaku berbagi pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan organisasi dan teknologi memiliki hubungan dengan upaya dan kemampuan individu terkait perilaku berbagi pengetahuan. Dalam penelitian ini internal attributions digunakan sebagai kecenderungan individu untuk menjelaskan perilaku atau hasil berdasarkan faktor-faktor internal, seperti kemampuan, usaha, atau karakteristik pribadi. Individu dengan kecenderungan ini diharapkan dapat lebih mudah menerima dan menjalankan program pembinaan, serta lebih bertanggung jawab dalam upaya pemulihan dan penerimaan kembali oleh masyarakat

3. Kerangka Berpikir

Fenomena radikalisme dan terorisme merupakan permasalahan kompleks yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan upaya preventif komprehensif dari berbagai pihak, termasuk Satgas Anti Teror, Densus 88, dan lembaga pemasyarakatan. Setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, individu yang terlibat dalam aksi terorisme disebut sebagai eks-narapidana teroris (eks-napiter). Proses yang mereka jalani pasca pembebasan adalah reintegrasi, yaitu upaya pemulihan dan penyesuaian kembali dengan masyarakat. Namun, dalam proses reintegrasi ini, eks-napiter sering menghadapi tantangan signifikan dari lingkungan sekitar, yang pada gilirannya memengaruhi peran dan kedudukan mereka dalam status sosial masyarakat.

Untuk memahami dinamika reintegrasi ini, penelitian ini berfokus pada status sosial keagamaan eks-napiter. Status sosial keagamaan

mencerminkan posisi atau kedudukan individu dalam struktur sosial yang terkait dengan afiliasi dan praktik keagamaan mereka. Status ini bervariasi berdasarkan tingkat partisipasi, afiliasi, dan posisi kepemimpinan dalam komunitas keagamaan. Konsep status sosial, yang terbagi antara *ascribed status* (diperoleh sejak lahir) dan *achieved status* (diperoleh melalui usaha), menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana status keagamaan eks-napiter, baik yang melekat sejak lahir maupun yang berubah karena upaya deradikalisasi, memengaruhi proses reintegrasi mereka.

Perubahan dalam pola pikir eks-napiter, terutama terkait pandangan mereka terhadap kelompok radikal, dapat dipahami melalui konsep persepsi diri. Persepsi diri adalah cara individu mengenali, mengevaluasi, dan memahami siapa dirinya, termasuk perannya, identitas, pengalaman masa lalu, dan potensi perubahan. Memahami persepsi diri eks-napiter akan mengungkap faktor-faktor internal yang mendorong perubahan sikap mereka, seperti munculnya kesadaran moral, rasa bersalah, keinginan untuk memperbaiki diri, atau refleksi pribadi yang mengubah keyakinan ideologis. Perubahan ini menjadi fondasi bagi mereka untuk menata kembali status sosial keagamaan mereka.

Keterkaitan antara persepsi diri dan disonansi kognitif juga sangat penting. Disonansi kognitif terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan, sikap, atau perilaku individu. Dalam konteks ini, penelitian akan menggali bagaimana eks-napiter mengalami disonansi kognitif ketika keyakinan radikal mereka bertentangan dengan persepsi diri yang baru atau realitas sosial yang mereka hadapi. Bagaimana mereka mengatasi disonansi ini misalnya, dengan mengubah keyakinan atau perilaku akan memengaruhi penentuan sikap mereka tentang persepsi dirinya.

Selanjutnya, proses atribusi akan menjelaskan bagaimana eks-napiter memahami penyebab peristiwa atau perilaku, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain, selama masa reintegrasi. Atribusi internal akan menganalisis sejauh mana eks-napiter menganggap faktor-faktor dari

dalam diri (misalnya, kemauan, usaha, atau perubahan keyakinan) sebagai penyebab keberhasilan atau kegagalan reintegrasi mereka. Sementara itu, atribusi eksternal akan melihat bagaimana mereka mengaitkan hasilnya dengan faktor-faktor di luar diri mereka (misalnya, stigma masyarakat, dukungan program, atau kesempatan kerja). Dengan memahami proses atribusi ini, kita dapat menggali lebih dalam bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi status sosial keagamaan mereka dan keberhasilan reintegrasi.

Hubungan antarkonsep ini dapat divisualisasikan dalam kerangka berpikir berikut:

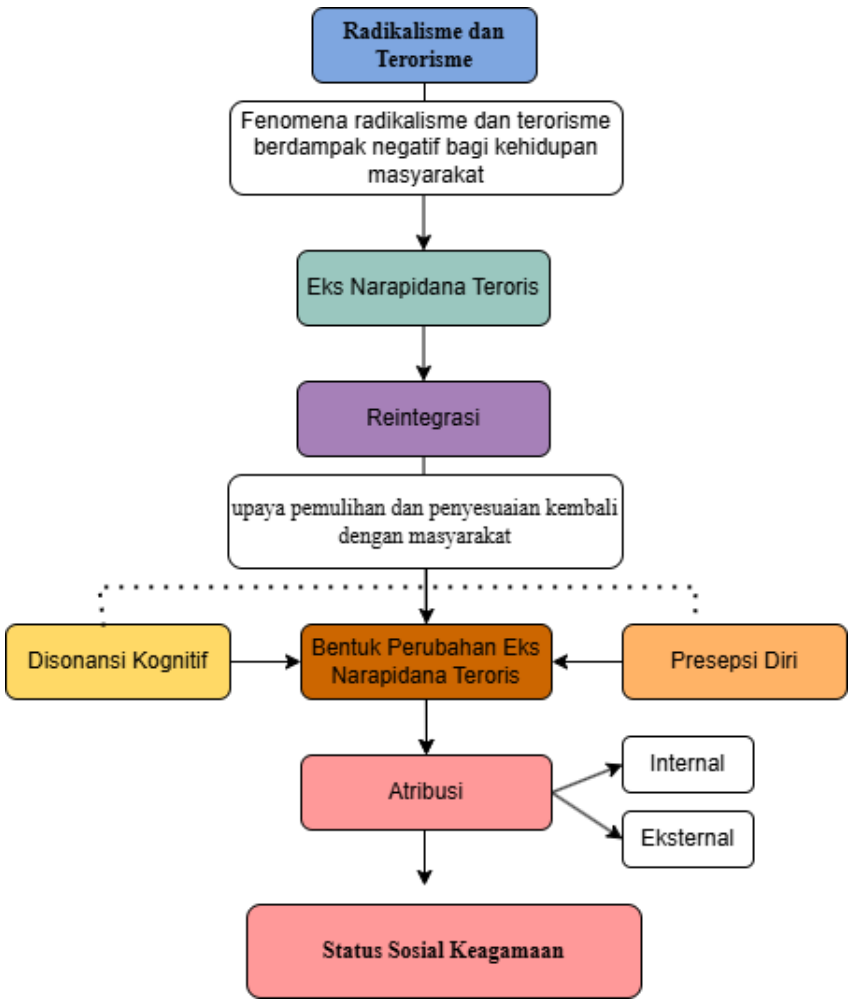

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan filosofi post-positivisme, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, kepercayaan, dan pemikiran individu maupun kelompok dalam kondisi alami, tanpa manipulasi eksperimental (Sugiyono, 2017). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan pengumpul data, memastikan keberadaan serta fungsi peneliti diketahui oleh subjek atau informan.

Pemilihan metode kualitatif ini didasari oleh tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai status sosial keagamaan mantan narapidana teroris. Metode ini memungkinkan penggalian sudut pandang, motivasi, dan aspirasi subjek melalui observasi intensif dan rinci terhadap fenomena sosial yang diteliti. Data yang dihasilkan berupa deskripsi kata-kata dan makna, bukan angka statistik, sehingga lebih menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi (Silalahi, 2006).

Fokus utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang peranan seorang individu dalam konteks lingkungan dan bidang spesifik tertentu (Sugiyono, 2017). Tujuannya adalah untuk mengungkapkan sudut pandang, motivasi, serta aspirasi individu melalui pengamatan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, peneliti menekankan bahwa kerangka kualitatif ini memungkinkan analisis mendalam terhadap interaksi individu dengan

lingkungannya, yang sangat relevan untuk memahami bagaimana peran tersebut dibentuk dan dijalankan.

2. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, studi tentang status sosial keagamaan mantan narapidana teroris akan dikaji dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena penelitian ini membutuhkan pemahaman dan interpretasi yang mendalam terhadap perilaku mantan narapidana teroris di dalam masyarakat. Fokus studi ini adalah mengeksplorasi perilaku dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan dinamika status sosial keagamaan para mantan narapidana teroris setelah bebas dari penjara. Oleh karena itu, pendekatan penelitian kualitatif yang sesuai adalah fenomenologi. Sesuai dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, data yang akan diungkap dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, kalimat, paragraf, dan dokumen, bukan dalam bentuk angka-angka. Hal ini selaras dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang diamati. Objek penelitian tidak akan diberi perlakuan khusus atau dimanipulasi oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh tetap berada pada kondisi alami, yang merupakan salah satu kriteria penelitian kualitatif. Aspek ini juga sejalan dengan pernyataan Sugiyono (2017) bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami, tidak dalam konteks eksperimental..

Fenomenologi sangat relevan untuk mengkaji pengalaman mantan narapidana teroris karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana individu tersebut memaknai pengalaman mereka setelah bebas dari penjara, terutama dalam konteks status sosial keagamaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman komprehensif peran individu dalam konteks spesifik. Menurut Sugiyono (2014), observasi merupakan sebuah

proses yang kompleks, yaitu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis atau psikologis. Dalam konteks ini, fenomenologi memungkinkan penggalian perspektif subjektif, motivasi, dan aspirasi mereka, yang seringkali kompleks dan multidimensional, serta tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dengan fokus pada pengalaman hidup (lived experience) dan pemaknaan yang diberikan oleh subjek itu sendiri, fenomenologi dapat mengungkap bagaimana mantan narapidana teroris menavigasi tantangan adaptasi sosial, menjaga harga diri, dan melakukan reintegrasi sosial, serta bagaimana keyakinan keagamaan mereka memengaruhi proses ini. Hal ini krusial untuk memahami dinamika status sosial keagamaan yang unik pada kelompok ini, yang jauh melampaui data permukaan.

3. Subjek Penelitian

a. Kriteria Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian merupakan langkah krusial dalam metode kualitatif untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, mendalam, dan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Dalam studi ini, penentuan subjek dilakukan melalui teknik purposive sampling, di mana individu dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik spesifik yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Kriteria yang ketat ini diterapkan untuk mengidentifikasi eks narapidana teroris yang pengalamannya dapat memberikan wawasan signifikan mengenai status sosial keagamaan mereka pasca-pembebasan. Adapun kriteria subjek yang harus dipenuhi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mantan narapidana yang pernah divonis atas tindak pidana terorisme: Subjek yang dipilih harus memiliki riwayat hukum yang jelas terkait kasus terorisme, memastikan bahwa pengalaman yang diungkapkan berasal dari individu yang memang memiliki latar belakang tersebut.

2) Telah menjalani masa hukuman dan telah bebas dari penjara: Kondisi ini memastikan bahwa subjek telah melewati proses pemidanaan dan saat ini berada dalam tahap reintegrasi sosial di masyarakat, sehingga pengalaman terkait status sosial keagamaan pasca-pembebasan dapat digali.
3) Bersedia berpartisipasi dalam penelitian dan menceritakan pengalaman pribadinya: Kesediaan subjek menjadi esensial untuk mendapatkan data yang otentik dan mendalam, mengingat sifat sensitif dari topik yang diteliti.
4) Tinggal di wilayah Jawa Timur: Pembatasan wilayah ini bertujuan untuk memfokuskan studi pada konteks geografis tertentu, yang memungkinkan penggalian data dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya lokal di Jawa Timur.
5) Tidak sedang terlibat kembali dalam aktivitas terorisme atau organisasi teroris: Kriteria ini memastikan bahwa subjek berada dalam jalur deradikalisasi dan reintegrasi yang positif, serta tidak membahayakan proses penelitian maupun peneliti.
6) Bersedia untuk diwawancarai secara mendalam tentang latar belakang, pandangan keagamaan, dan kondisi sosial ekonominya saat ini: Wawancara mendalam merupakan metode utama dalam penelitian kualitatif ini, sehingga kesediaan subjek untuk memberikan informasi detail di area-area tersebut sangat diperlukan untuk memahami konstruksi status sosial keagamaan mereka.

Penerapan kriteria ini menjadi landasan fundamental dalam memastikan data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai pengalaman serta konstruksi status sosial keagamaan eks narapidana teroris dalam konteks reintegrasi mereka di masyarakat.

b. Prosedur Pemilihan Subjek

Pada penelitian ini, peneliti menentukan prosedur pemilihan subjek sebagai berikut

1) Melakukan skrining awal berdasarkan kriteria kualifikasi subjek penelitian, seperti rentang usia, lama bebas dari penjara, dan wilayah tempat tinggal.
2) Menghubungi calon subjek penelitian yang memenuhi kriteria awal, memberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian, serta meminta kesediaan mereka untuk berpartisipasi.
3) Melakukan perjanjian dan informed consent dengan subjek penelitian yang bersedia terlibat, memastikan kerahasiaan identitas dan informasi yang diberikan.
4) Melakukan wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data terkait status sosial keagamaan ex-narapidana teroris.
5) Melakukan seleksi final terhadap data dan informasi yang terkumpul, memastikan kesesuaian dengan kriteria kualifikasi dan tujuan penelitian.
6) Menetapkan subjek penelitian final yang akan diikutsertakan dalam analisis data dan pelaporan hasil penelitian.

Melalui prosedur yang telah diuraikan, peneliti dapat memastikan bahwa subjek penelitian yang terpilih benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses seleksi dan verifikasi yang dilakukan akan memastikan bahwa subjek penelitian dapat memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dengan demikian, data dan informasi yang dikumpulkan dari para subjek penelitian dapat dijadikan dasar yang akurat untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait status sosial keagamaan mantan narapidana teroris.

4. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan relevansi terhadap data yang dibutuhkan. Berdasarkan pertimbangan ini, penelitian berlokasi di Yayasan Lingkar Perdamaian, Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, serta wilayah sekitarnya.Yayasan Lingkar Perdamaian dipilih karena merupakan salah satu lembaga yang aktif dalam program deradikalisasi dan reintegrasi mantan narapidana teroris. Keberadaan yayasan ini diyakini akan mempermudah peneliti dalam mengakses subjek penelitian yang relevan dan mendapatkan informasi mendalam mengenai status sosial keagamaan mereka dalam konteks program pembinaan dan kehidupan pasca-penjara. Lokasi ini dianggap strategis untuk menggali data yang diperlukan dalam mengkaji fenomena yang menjadi fokus penelitian ini

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek atau entitas dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan data itu sendiri merupakan informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penelitian di lapangan, yang dapat dianalisis untuk memahami sebuah fenomena atau mendukung suatu teori. Data tersebut disajikan dalam bentuk uraian deskriptif atau kata-kata.

Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang-orang yang memberikan respon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik secara tertulis maupun lisan. Jadi, responden adalah sumber data yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian.Dengan demikian, sumber data dan data itu sendiri merupakan dua hal yang saling terkait dalam proses pengumpulan informasi untuk memahami fenomena yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ;

a. Data Primer

Sumber data utama (primer) dalam penelitian adalah data yang diambil langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah informasi atau fakta yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau pihak yang membutuhkannya.

Data primer ini disebut juga data asli atau data baru, karena diperoleh langsung dari sumber tanpa melalui perantara. Data primer merupakan sumber informasi utama yang didapatkan oleh peneliti untuk memahami fenomena yang sedang dikaji. Dengan mengumpulkan data primer melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam terkait objek penelitian. Data primer ini menjadi landasan penting bagi analisis dan pembahasan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data di luar kata-kata dan tindakan, yaitu sumber data tertulis. Data sekunder adalah informasi atau fakta yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Selain sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi, sumber data sekunder dapat berupa peristiwa, benda, gambar, rekaman, dan dokumen. Data sekunder ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan penelitian sebelumnya, atau sumber-sumber tertulis lainnya.

Data sekunder berperan sebagai data pendukung dan pelengkap dalam penelitian, untuk memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang dikaji. Meskipun bukan merupakan sumber utama, data sekunder tetap menjadi komponen penting dalam melengkapi analisis dan pembahasan dalam penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yang menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang diamati dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian (Sugiyono, 2017).

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan sistematis terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017), observasi merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai proses biologis atau psikologis. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris secara langsung dari sumbernya, tanpa bergantung pada laporan pihak lain. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memahami konteks sosial, interaksi, dan perilaku non-verbal mantan narapidana teroris di lingkungan mereka, yang akan memberikan pemahaman holistik tentang status sosial keagamaan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlansung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai (Sugiyono, 2017). Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi lisan secara langsung. Dalam wawancara, alur komunikasi berjalan satu arah, di mana pihak pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sementara pihak yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, inisiatif dan kontrol atas jalannya wawancara berada di tangan pewawancara, sementara pihak

yang diwawancarai berperan sebagai responden yang memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh pewawancara.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara semi tersruktur. Wawancara semi-terstruktur merupakan jenis wawancara yang menggabungkan karakteristik dari wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara semi-terstruktur, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Meski demikian, peneliti tetap memberikan ruang dan keleluasaan kepada responden untuk menyampaikan informasi tambahan di luar pertanyaan yang diajukan. Pendekatan wawancara semi-terstruktur ini memberikan fleksibilitas dalam proses pengumpulan data, namun tetap mempertahankan konsistensi data yang diperoleh dari responden. Dengan demikian, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam sekaligus menjaga keseragaman data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dan memperoleh gambaran komprehensif tentang fenomena yang diteliti, yaitu status sosial keagamaan mantan narapidana teroris. Data yang dihasilkan akan berbentuk deskripsi kata-kata dan perilaku, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara, seperti dokumen terkait program deradikalisasi, laporan yayasan, atau arsip media yang relevan, untuk memperkuat validitas temuan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada Penelitian ini mengadopsi Model Analisis Interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al., (2014), sebuah pendekatan yang sangat relevan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks. Model ini, dengan sifatnya yang iteratif dan berkelanjutan, memungkinkan peneliti untuk secara dinamis mengelola dan memaknai data yang kaya dari lapangan. Tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan berulang sepanjang proses penelitian, memastikan setiap tahapan analisis mendukung validitas temuan.

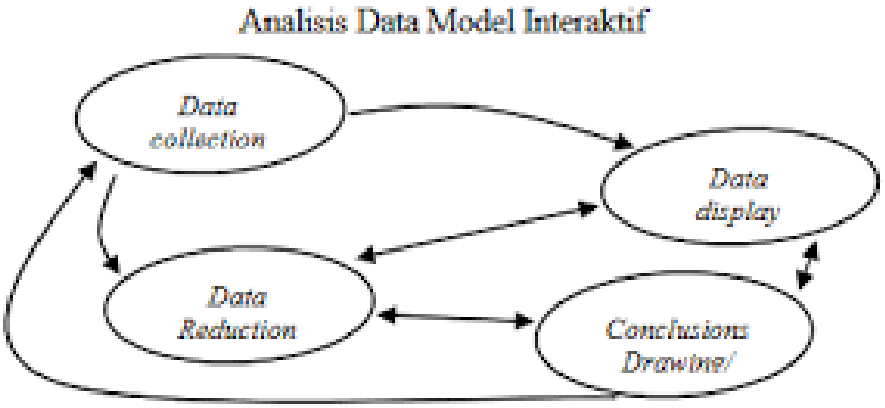

Gambar 3. 1 Model analisis interaktif

a. Reduksi Data (*Data Reduction*):

Tahap pertama dalam proses analisis ini adalah reduksi data, sebuah langkah krusial untuk mengelola volume informasi yang besar dari wawancara, observasi, dan dokumen. Reduksi data melibatkan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah agar menjadi lebih terkelola, ringkas, dan relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mempertajam fokus, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak esensial, serta mengorganisir data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi dengan lebih efisien.

Secara operasional, dalam konteks penelitian mengenai status sosial keagamaan eks-narapidana teroris, reduksi data akan dilakukan dengan cermat. Dari transkrip wawancara yang detail, peneliti akan menyaring dan menghilangkan kata-kata atau kalimat yang tidak secara langsung relevan dengan aspek-aspek seperti status sosial keagamaan mereka, tantangan reintegrasi yang dihadapi, atau strategi adaptasi yang mereka gunakan. Bagian-bagian yang bersifat repetitif akan diringkas untuk efisiensi. Lebih lanjut, peneliti akan secara aktif menyoroti dan membuat kode (coding) pada kutipan-kutipan kunci berdasarkan hasil pengumpulan data. Dengan demikian, reduksi data menjadi langkah penting dalam analisis kualitatif untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam memaknai data.

Tabel 3. 1 Reduksi Data

Transkrip Wawancara	**Pemadatan Fakta**	**Kata Kunci**	**Kode**
Pandangan saya tentang penerapan Islam yang rasional adalah bahwa Islam itu harus dipahami dan diterapkan dengan menggunakan akal dan kebijaksanaan. Islam mengajarkan perdamaian, toleransi, dan keadilan. Maka dari itu, Kekerasan dan terorisme tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya.	Saya memahami Islam rasional itu menggunakan akal dan kebijaksanaan	Islam berakal dan kebijaksanaan	N1.1
	Islam mengajarkan perdamaian, toleransi, keadilan	Islam mengajarkan perdamaian, toleransi	N1.2
	Kekerasan terorisme tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam	Terorisme tidak sesuai nilai	N1.3

b. Penyajian Data (*Data Display*):

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Proses ini merupakan pengaturan dan penyusunan data yang telah direduksi ke dalam format yang terorganisir. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti matriks, grafik, tabel, atau narasi terstruktur.

Tujuan utama penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang terkandung dalam data, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan yang valid. Selain itu, penyajian data yang baik juga memungkinkan tindakan atau langkah selanjutnya dapat direncanakan dengan lebih baik berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Secara operasional, pada penelitian ini, data yang telah direduksi dari berbagai wawancara dan sumber lain akan disajikan, misalnya, dalam bentuk matriks tematik. Baris matriks dapat mewakili tema-tema utama yang muncul, sementara kolom dapat berisi ringkasan atau kutipan kunci dari setiap informan yang terkait dengan tema tersebut. Alternatifnya, data bisa disajikan dalam bentuk narasi deskriptif terstruktur, di mana setiap sub-bagian membahas satu tema atau kategori yang muncul, didukung oleh kutipan langsung dari informan untuk menjaga autentisitas. Penyajian ini akan mempermudah visualisasi dan perbandingan antar data, membantu peneliti mengidentifikasi pola-pola yang signifikan.

Tabel 3. 2 Display Data

Tema	**Sub tema**	**Kategorisasi**	**Fakta**	**Kode**
Faktor Perubahan Ideologi	Motivasi Bergabung	Faktor Ideologi	Saya bergabung dengan JI karena situasi yang memerlukan perlindungan bagi kaum Muslimin.	N2.11

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini melibatkan pembuatan pemaknaan atau pemahaman dari data yang telah disajikan dalam bentuk yang lebih terorganisir. Dalam tahap ini, peneliti berusaha untuk mencari pola, hubungan, dan kecenderungan yang terkandung dalam data untuk menentukan apa yang dapat dipelajari, dimaknai, atau disimpulkan dari fenomena yang diamati. Penarikan kesimpulan tidak hanya sekadar mendeskripsikan apa yang terlihat di permukaan, melainkan melibatkan upaya untuk menggali makna yang lebih mendalam, mencari penjelasan atas fenomena yang diamati, serta mengaitkannya dengan teori atau konsep yang relevan.

Secara operasional, berdasarkan pola yang teridentifikasi dari penyajian data, peneliti akan mulai mengidentifikasi tema-tema mayor dan mengembangkan kesimpulan awal yang menjawab pertanyaan penelitian. Proses penarikan kesimpulan menjadi kunci bagi peneliti untuk dapat menarik kesimpulan yang valid dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang tepat berdasarkan temuan yang diperoleh.

8. Keabsahan Penelitian

Menurut Zuldafrial (2012) “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kreteria, dan paradigma sendiri”. Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenenaran hasil suatu penelitian. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan Teknik triangulasi data.

Menurut Sugiyono (2015) triangulasi data merupakan Teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi data.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah suatu teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar dapat dipercaya (kredibel). Caranya adalah dengan membandingkan informasi yang sama yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, data yang didapat dari wawancara akan dibandingkan dengan data dari arsip, dokumen, atau sumber lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah informasi tersebut konsisten dan dapat diyakini kebenarannya. Jika informasi dari berbagai sumber menunjukkan hal yang sama, maka data tersebut dianggap lebih kuat dan valid.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan metode yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Dalam praktiknya, peneliti dapat mengumpulkan data melalui observasi langsung, lalu mengeceknya kembali menggunakan teknik lain seperti wawancara. Jika informasi yang diperoleh dari kedua teknik tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, maka data tersebut dianggap lebih valid. Dengan demikian, triangulasi teknik membantu memperkuat temuan penelitian dengan membandingkan hasil dari berbagai pendekatan yang digunakan terhadap objek atau sumber yang sama.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah salah satu jenis triangulasi dalam penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas atau keabsahan data dengan cara melakukan pengumpulan data pada waktu atau situasi yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat apakah data yang diperoleh tetap konsisten meskipun dikumpulkan dalam kondisi temporal yang bervariasi, seperti pagi, siang, sore, atau bahkan hari yang berbeda.

Perbedaan waktu pengumpulan data dapat memengaruhi kondisi emosional, fisik, atau suasana hati narasumber, sehingga berpotensi menghasilkan variasi dalam informasi yang diberikan. Misalnya, wawancara yang dilakukan di pagi hari saat narasumber masih segar bisa memberikan hasil yang berbeda dibandingkan wawancara yang dilakukan di sore hari saat mereka mulai lelah. Oleh karena itu, dengan melakukan pengumpulan data pada berbagai waktu, peneliti dapat memeriksa konsistensi informasi dan meningkatkan validitas temuan penelitian.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Subjek

a. Subjek I (AF)

AF adalah seorang mantan narapidana terorisme (napiter) yang kini dikenal sebagai pendiri dan ketua Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) di Lamongan. AF sendiri pernah terlibat dalam berbagai konflik di Filipina Selatan serta di Ambon dan Poso. Setelah menjalani masa lalunya yang terkait dengan organisasi teroris internasional Al-Qaidah & Jamaah Islamiyah, AF mengalami titik balik dan kini aktif berjuang untuk perdamaian serta moderasi beragama. Pada Maret 2017, ia mengumumkan berdirinya YLP yang bertujuan untuk membantu mantan pelaku terorisme kembali ke masyarakat dan meninggalkan ideologi ekstrem.

Terbaru, AF berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Februari 2023. Disertasinya berjudul "Edukasi Moderasi Beragama Bagi Para Mantan Napiter" dan ia lulus dengan predikat Cum Laude. Pencapaian ini menjadi momen mengharukan bagi Ali Fauzi, mengingat masa lalunya sebagai perakit bom, dan ia memiliki keinginan untuk menjadi "dokter teroris" yang mengobati pemikiran destruktif. Meskipun mengalami kesulitan dalam menyelesaikan studinya, dukungan dari istri dan promotornya menjadi motivasi besar. Ia kini juga berwirausaha di bidang kuliner dengan memiliki kafe dan beberapa tempat makan di Lamongan.

b. Subjek II (BA)

BA adalah eks-napiter dari Bojonegoro yang sebelumnya tergabung dalam Jamaah Islamiyah. Setelah menjalani masa hukumannya, BA dibebaskan bersyarat dari Lapas Kelas IIA Bojonegoro pada 23 April 2024. Pembebasan ini merupakan

implementasi dari program deradikalisasi dan dianggap sebagai keberhasilan dalam pola pembinaan yang diterapkan di lapas. Momen pembebasannya disambut dengan kebahagiaan saat ia dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Namanya juga tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait kasus kejahatan terhadap keamanan negara.

c. Subjek III (S)

S, berasal dari Malang, memiliki rekam jejak aktivisme sejak sekolah, termasuk sebagai ketua OSIS dan HMI. Ia sempat terlibat dengan ISIS setelah berangkat ke Suriah pada 2013-2014 dengan dalih misi kemanusiaan, namun kemudian dididik untuk berperang dan dibaiat oleh organisasi tersebut di Aleppo. Meskipun menghadapi ancaman dan larangan untuk kembali, S berhasil pulang ke Indonesia, namun kemudian menjadi buronan Densus 88 dan akhirnya ditangkap di Malang sekitar tahun 2016 karena keterkaitannya dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Setelah menjalani masa tahanan, Syahrul kini memilih jalan "jihad" yang berbeda, yaitu melalui produk kesehatan bernama "Calyna," sebagai bagian dari proses penyembuhan diri dan upayanya untuk bersosialisasi serta menyebarkan kebaikan kepada orang lain.

2. Temuan Penelitian

a. Motivasi Bergabung pada kelompok Radikal

Motivasi individu untuk bergabung dengan kelompok ekstremis umumnya berangkat dari keprihatinan terhadap isu-isu kemanusiaan yang menyentuh identitas keagamaan mereka, seperti isu Palestina dan konflik yang menimpa umat Islam. Isu-isu tersebut sering dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis sebagai bahan propaganda untuk menggiring individu ke dalam narasi perjuangan dengan istilah jihad. AF menyatakan:

> " Awalnya saya itu mengikuti isu isu yang diangkat oleh kelompok mereka, pada waktu itu isu yang diangkat adalah isu

> Palestina. Kita digiring kesana supaya kita bisa bertindak langsung, bahasanya itu Jihad untuk memperjuangkan umat islam. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka menggunakan cara propaganda untuk mencari dukungan simpati dalam proses rekriutmen anggota mereka. " (N1.62)

Keterbatasan pengetahuan agama serta minimnya akses terhadap ajaran Islam yang moderat menjadi faktor lain yang memengaruhi keputusan mereka (N1.68). Pemahaman keislaman yang diperoleh sebagian besar berasal dari narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok ekstrem.

Semangat idealisme remaja (N1.70), rasa ketidakadilan terhadap penindasan umat Islam di berbagai wilayah (N1.71), serta ketidakpuasan terhadap kondisi global menjadi bahan bakar yang dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk meyakinkan bahwa kekerasan adalah satu-satunya solusi.

Motivasi individu untuk bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) tidak selalu bersifat ideologis secara langsung, namun sering kali dipicu oleh dorongan situasional dan pengalaman personal dalam konteks sosial-politik. BA mengatakan :

> "2000 ee bulan Juli kan ee awal tahun ajaran itu lah bulan 1 itu ee para tokoh JI dai-dai JI aktivis aktivis JI itu ke sana, dalam rangka pembelaan kaum muslimin yang Di poso yang dibantai itu. Kan dari situ kemudian saya bergabung di situ karena saya melihat ini betul-betul kita punya peran di situ untuk pembelaan kaum muslimin yang memang waktu itu butuh dibela.." (N2.11)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa motivasi bergabung lebih banyak dilatarbelakangi oleh semangat solidaritas dan pembelaan terhadap umat Islam yang dianggap sedang mengalami ancaman (N2.8). Narasumber tidak secara eksplisit menyatakan bahwa ia memahami ideologi kelompok secara utuh saat bergabung, melainkan karena persepsi bahwa JI merupakan pihak yang aktif melindungi umat (N2.10).

Selain itu BA berpendapat bahwa faktor pengembangan diri sebagai salah satu daya tarik dalam mengikuti Jamaah Islamiyah (N2.12).

Dalam hal ini, keterlibatan dalam kelompok ekstrem bukan semata-mata karena ketertarikan terhadap ideologi radikal, namun juga karena peran sosial dan keagamaan yang ditawarkan oleh kelompok (N2.13). Posisi sebagai dai, pendakwah, atau pengajar memberikan rasa makna dan nilai diri yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa kelompok ekstremis memiliki daya tarik struktural melalui penugasan, sistem pelatihan, dan relasi sosial yang terorganisir.

Salah satu narasumber, yang berinisial S, menunjukkan bahwa motivasi bergabung dengan kelompok ekstremis tidak hanya dilatarbelakangi oleh solidaritas terhadap sesama Muslim atau kesempatan pengembangan diri, tetapi juga didasari oleh kekecewaan terhadap sejarah dan kebijakan politik Indonesia.

> "kemudian pembuatan undang undang dasar kan ada kalimat dan menegakkan syarat sarat Islam bagi pemeluknya, tapi ketika itu disidang yang terakhir kan ada penghapusan 7 kalimat, lah itu adalah bentuk pengkhianatan Muhammad Hatta terhadap cita cita dari para ulama waktu itu untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. itu yang membuat kita bencinya kepada Indonesia itu ya itu penghapusan itu, dengan alasan, kan dia cuma mau mendapatkan informasi dari laksamana Maeda di wilayah timur nanti kalau ini diterapkan mereka enggak mau gabung kan begitu." (N3.99)

Pandangan ini mencerminkan adanya narasi sejarah alternatif yang dibangun untuk menjustifikasi kebencian terhadap negara dan memunculkan semangat perjuangan ideologis. Dalam hal ini, penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi simbol pengkhianatan negara terhadap Islam versi mereka (N3.92), sehingga membentuk persepsi bahwa sistem negara Indonesia tidak mewakili Islam yang sebenarnya (N3.93).

> "itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Islam dan kaum muslimin itu yang membuat kita benci dengan negara ini itu. nah itu yang ingin kita kembalikan lagi gitu loh bahasanya jadi pemahaman pemahaman kita seperti itu." (N3.101)

Motivasi ini bersifat ideologis dan politis, dengan fokus pada penegakan syariat Islam sebagai solusi dari ketidakadilan yang dirasakan

(N3.128). Dalam kerangka ini, jihad dipahami sebagai tindakan untuk menolong kaum Muslimin yang terzalimi, terutama yang berada dalam posisi minoritas di wilayah konflik (N3.130).

Perbedaan motivasi awal bergabung antara narasumber terlihat jelas dari pemicu utamanya. AF didorong oleh isu kemanusiaan global dan propaganda jihad yang memanfaatkan keterbatasan pengetahuan agamanya, serta semangat idealisme remaja dan rasa ketidakadilan global. BA lebih termotivasi oleh dorongan situasional spesifik seperti konflik Poso, persepsi bahwa Jamaah Islamiyah (JI) adalah pihak yang aktif membela umat, dan adanya kesempatan pengembangan diri serta peran sosial-keagamaan di dalam kelompok. Sementara itu, S memiliki motivasi yang paling ideologis dan politis, berakar pada kekecewaan terhadap sejarah politik Indonesia (khususnya penghapusan 7 kata di Piagam Jakarta) dan keinginan kuat untuk menegakkan syariat Islam sebagai solusi atas ketidakadilan yang dirasakan.

Meskipun terdapat perbedaan dalam pemicu spesifik, persamaan di antara ketiganya adalah adanya rasa ketidakpuasan atau ketidakadilan yang menjadi celah bagi masuknya ideologi ekstrem. Mereka semua, pada titik tertentu, tertarik pada narasi perjuangan atau solusi yang ditawarkan oleh kelompok radikal, yang mengklaklaim dapat mengatasi masalah yang mereka rasakan. Selain itu, faktor propaganda dan narasi yang dibangun oleh kelompok ekstrem memainkan peran penting dalam menarik simpati dan meyakinkan mereka untuk bergabung, dengan mengaitkan isu-isu yang mereka pedulikan (baik itu isu kemanusiaan, solidaritas umat, atau penegakan syariat) dengan agenda kelompok radikal.

b. Bentuk perubahan ideologi eks narapidna teroris

Proses keluarnya individu dari kelompok radikal merupakan perjalanan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor personal,

sosial, dan struktural. Tidak jarang, keputusan untuk meninggalkan kelompok ekstremis dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap realitas organisasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal yang dulu diyakini, rasa lelah terhadap konflik berkepanjangan, atau munculnya kesadaran moral akibat pengalaman langsung atas dampak kekerasan. Perubahan ideologi yang dialami oleh para narasumber tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap dengan pola yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, interaksi sosial, dan kondisi lingkungan.

Salah satu bentuk yang paling signifikan dalam mendorong individu keluar dari kelompok radikal adalah dukungan dari keluarga inti (N1.134). Bagi AF, kehadiran istri dan anak-anak menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti dalam proses transformasinya. Dukungan emosional yang diberikan keluarga tidak hanya memberikan rasa aman (N1.135), tetapi juga membuka jalan bagi refleksi dan pertimbangan ulang terhadap jalan hidup yang sebelumnya ia tempuh.

> "Kemudian Keluarga saya, terutama istri dan anak-anak, memainkan peran penting dalam perubahan saya. Mereka memberikan dukungan emosional dan dorongan untuk mencari jalan yang lebih baik dan lebih damai. Dukungan ini memberikan saya kekuatan untuk meninggalkan masa lalu yang kelam dan berusaha untuk memperbaiki diri." (N1.134)

Dorongan tersebut memberi kekuatan moral dan mental bagi AF untuk meninggalkan masa lalu yang kelam dan membuka lembaran baru menuju kehidupan yang lebih konstruktif dan damai (N1.134). Ia mulai menyadari bahwa perubahan bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap keyakinan lama (N1.15), melainkan sebuah proses refleksi dan pertumbuhan pribadi yang lebih dewasa. Dengan dukungan dari lingkungan sekitar dan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis, AF perlahan membangun identitas baru yang lebih inklusif, terbuka, dan berorientasi pada kontribusi positif bagi masyarakat (N1.17).

Bagi sebagian individu, pengalaman langsung menghadapi situasi yang berisiko tinggi, seperti penggerebekan atau penangkapan (N2.271), menjadi pemicu penting dalam mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka dalam jaringan radikal. BA, misalnya, menggambarkan tekanan dan ketegangan yang terus-menerus ia alami selama aktif dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Sejak 2004, ia sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang penggerebekan aparat, yang semakin sering terjadi di wilayah Sulawesi.

> "Lah sejak 2004 loh saat 2004 itu di Sulawesi aja sering digerebek, saya selalu lolos itu lolos. Tak bilang kamu itu pintar nangkap saya sebelum Subuh kalau setelah Subuh saya hilang enggak ketangkap itu.Itu ada persiapan betul itu sudah bawa HP saya ya kan itu saya habis Subuh ini saya enggak pulang nih. Karena malamnya itu saya diberi tahu saya mimpi diinterogasi, mimpi diinterogasi." (N2.272)

Kewaspadaan tinggi dan berbagai strategi antisipatif, seperti membawa ponsel setiap saat dan memperhatikan waktu-waktu rawan penangkapan (N2.273), menggambarkan kondisi hidup yang penuh tekanan. Bahkan mimpi diinterogasi di malam hari dianggap sebagai bentuk peringatan batin (N2.274). Tekanan situasional ini memicu refleksi yang lebih dalam dan mendorong individu seperti BA untuk menimbang kembali jalur yang ditempuh, termasuk kemungkinan keluar dari kelompok demi keselamatan pribadi dan keluarga.

Sementara itu, narasumber S menyoroti pentingnya proses intelektual dan spiritual dalam memutus keterikatan dengan kelompok radikal. Kesadaran akan kesalahan pemahaman lama mulai tumbuh ketika ia terlibat dalam diskusi dengan para ustadz dan ulama yang lebih moderat.

> "kemudian ketika saya di penjara, Kemudian Di sana juga ada pembinaan dari dari pihak Aparat ada pembinaan sendiri dari diskusi sama teman teman ketika kita mengevaluasi kejadian kejadian akhirnya ada keterbukaan dari sisi kami itu ada pencerahan pencerahan baru ya." (N3.171)

Melalui interaksi ini, S mendapatkan pencerahan yang membuka ruang refleksi terhadap ajaran yang dulu diyakininya. Proses ini juga

ditopang oleh langkah formal seperti pembubaran JI yang difasilitasi oleh Densus 88 (N3.287), di mana para anggotanya kemudian mendeklarasikan kembali kesetiaan kepada NKRI (N3.288). Program deradikalisasi yang dijalankan oleh lembaga seperti BNPT pun disebut memiliki pendekatan psikologis yang signifikan dalam mendampingi proses transisi ini. Narasumber bahkan menyebut pentingnya pendekatan berbasis psikologi dalam menyesuaikan metode dengan kondisi individu (N3.415). Perubahan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang keliru dapat dikoreksi melalui dialog, bimbingan ulama, dan pendampingan yang berkelanjutan.

Pola perubahan ideologi pada ketiga narasumber menunjukkan variasi yang signifikan namun saling melengkapi. AF menunjukkan pola perubahan yang berbasis dukungan emosional keluarga dan refleksi personal intens, di mana ikatan emosional dan pengalaman penderitaan menjadi pemicu utama. BA merepresentasikan pola perubahan yang pragmatis dan situasional, dengan tekanan eksternal dan kebutuhan bertahan hidup sebagai katalisator. Sementara itu, S mencerminkan pola perubahan yang intelektual-spiritual dan terstruktur, menekankan pentingnya dialog keilmuan dengan pihak moderat dan pembinaan formal dalam merekonstruksi pemahaman keagamaan.

Perbedaan mendasar terletak pada faktor pendorong utamanya: emosi dan keluarga (AF), pragmatisme dan kondisi fisik (BA), serta intelektualisme dan diskusi (S). Kesamaan di antara ketiganya adalah bahwa masa penahanan atau pengalaman langsung dengan dampak ekstremisme seringkali menjadi periode krusial untuk refleksi dan pembukaan diri terhadap perspektif baru. Proses perubahan mereka semua bersifat gradual dan melibatkan dekonstruksi ideologi lama menuju pemahaman yang lebih moderat, didukung oleh interaksi dengan lingkungan atau individu yang berbeda pandangan.

c. Reintegrasi sosial eks narapidana teroris

Reintegrasi sosial memainkan peran penting dalam membentuk status sosial keagamaan mantan narapidana terorisme. Setelah mengalami perubahan ideologi dan melepaskan diri dari jaringan ekstrem, eks napiter tidak hanya perlu diterima kembali sebagai warga masyarakat biasa, tetapi juga sebagai individu yang memegang identitas keagamaan tertentu yang seringkali menjadi pusat perhatian dan evaluasi sosial. Dalam konteks ini, status sosial keagamaan mereka menjadi parameter apakah masyarakat melihat mereka sebagai tokoh keagamaan yang positif atau tetap mencurigai mereka sebagai residu ideologi radikal.

1) Stigma Masyarakat

Proses reintegrasi mantan narapidana terorisme ke dalam masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma negatif yang dilekatkan masyarakat terhadap mantan pelaku kekerasan berbasis ideologi. Stigma ini seringkali menjadi penghalang utama bagi individu untuk diterima kembali secara sosial dan psikologis.

Dalam proses reintegrasi sosial, para mantan narapidana kasus terorisme menghadapi tantangan yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan perubahan lingkungan sosial pasca pembebasan. Salah satu narasumber menyatakan bahwa ia mengalami perubahan besar dalam interaksi sosialnya, terutama karena sikap masyarakat yang meragukan ketulusan proses perubahan dirinya. Ia mengungkapkan,

> "Dalam hal lingkungan sosial, ada perubahan yang cukup signifikan. Awalnya, banyak orang yang skeptis dan meragukan ketulusan perubahan saya" (N1.20).

Penolakan dari masyarakat menjadi hambatan utama dalam usahanya untuk kembali diterima secara sosial. Kesulitan ini semakin terasa ketika narasumber kembali dari luar negeri ke

Indonesia. Ia tidak hanya mengalami penolakan sosial, tetapi juga ancaman dari kelompok radikal lama yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia menuturkan,

> "Setelah kembali ke Indonesia, saya mengalami kesulitan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Banyak ancaman dari kelompok lama dan penolakan dari masyarakat sekitar..." (N1.79).

Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang cukup kuat, ditambah dengan rasa takut akan potensi pengkhianatan yang dituduhkan oleh kelompok lamanya. Rasa takut akan penolakan dari masyarakat dan ancaman dari kelompok radikal lama menjadi hambatan dalam reintegrasi ke masyarakat. Namun hal tersebut menjadi motivasi untuk berusaha membuktikan perubahan melalui tindakan nyata dan konsisten (N1.161).

> "Selama 3 tahun itu kan saya bina Masjid Muhammadiyah itu masjid yang sepi ya" (N2.155).

Setelah melalui berbagai upaya yang konsisten, masjid yang awalnya sepi mulai berkembang dan dipenuhi oleh berbagai aktivitas keagamaan. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan dalam membina komunitas, meskipun juga memunculkan dinamika sosial seperti kecemburuan di antara sesama anggota (N2.156), sebuah hal yang kerap terjadi di lingkungan organisasi keagamaan yang besar. Di balik keberhasilan tersebut, perjuangannya tidak lepas dari tantangan eksternal, termasuk pengawasan ketat dari pihak keamanan. Hal ini terjadi terutama setelah ia terlibat dalam sebuah acara tabligh akbar yang menghadirkan tokoh kontroversial, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, yang membuat aparat intelijen semakin memperhatikan pergerakannya karena dianggap memiliki latar belakang yang berisiko (N2.157).

Temuan ini menunjukkan bahwa proses reintegrasi sosial bagi mantan ekstremis tidak hanya bergantung pada niat baik individu, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dan negara

merespons upaya perubahan mereka. Penolakan, pengawasan, dan ancaman menjadi realitas awal yang harus dihadapi sebelum mereka benar-benar bisa kembali diterima sebagai bagian dari komunitas.

2) Status Sosial Keagamaan

Selain menghadapi stigma, beberapa mantan narapidana teroris justru mengalami peningkatan status sosial di masyarakat melalui peran keagamaan yang mereka emban. Mereka diterima kembali melalui aktivitas keagamaan, bahkan menjadi figur yang dihormati di komunitas masing-masing.

Status sosial keagamaan mantan narapidana terorisme mengalami rekonstruksi ulang seiring dengan proses reintegrasi ke masyarakat. Salah satu narasumber menjelaskan bahwa tidak lama setelah dibebaskan, ia mulai kembali aktif dalam kegiatan keagamaan, bahkan sudah diminta mengisi ceramah akikah dan pengajian di daerah Klepek meskipun masa bebasnya belum genap satu bulan (N2.187). Aktivitas ini mencerminkan adanya ruang partisipasi yang tetap terbuka dari masyarakat, khususnya ketika individu menunjukkan itikad dan komitmen yang positif dalam menjalani perubahan.

Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa status sosial keagamaan mantan narapidana terorisme dapat tetap dipertahankan bahkan mengalami penguatan di lingkungan sosial yang sudah mengenal baik latar belakang individu tersebut. Salah satu narasumber menunjukkan bahwa dirinya masih dipercaya menjadi imam masjid di wilayah tempat tinggalnya. Ketika imam utama tidak hadir, masyarakat tetap memintanya untuk memimpin salat, mencerminkan bentuk penerimaan sosial yang positif (N2.188). Meskipun menyadari statusnya sebagai mantan teroris, narasumber menjelaskan bahwa kedekatan emosional dengan masyarakat serta fakta bahwa dirinya berasal dari daerah tersebut menjadi faktor yang memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat. Dalam

keterangannya, narasumber mengungkap bahwa masyarakat tetap mempertimbangkan hal itu, bahkan ketika mengetahui masa lalunya sebagai bagian dari jaringan ekstremis (N2.189). Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks tertentu, rekam jejak keagamaan dan kedekatan komunitas dapat menjadi modal sosial penting bagi proses reintegrasi mantan pelaku ekstremisme.

Selain menjadi imam masjid, narasumber juga aktif membangun lembaga pendidikan keagamaan di lingkungannya, yang memperkuat legitimasi status sosial keagamaannya. Ia mendirikan Rumah Quran di mana anak-anak sekitar secara rutin mengikuti kegiatan mengaji setiap sore (N2.190). Kegiatan ini menunjukkan bahwa status sosial keagamaan tidak hanya dapat dipulihkan, tetapi juga direkonstruksi melalui kontribusi nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Peran ini bukan saja memperkuat posisi sosial narasumber dalam komunitas lokal, tetapi juga menjadi sarana penting untuk menegaskan komitmen terhadap perubahan, membuktikan kapasitas positif pasca-hukuman, dan membangun kepercayaan ulang dari masyarakat terhadap mantan pelaku ekstremisme. Temuan ini menggarisbawahi bahwa partisipasi dalam aktivitas keagamaan produktif dapat menjadi indikator penting dalam proses reintegrasi sosial dan spiritual mantan narapidana terorisme.

Reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme menunjukkan variasi pola yang signifikan. AF menghadapi stigma kuat dan penolakan langsung dari masyarakat, bahkan ancaman dari kelompok lamanya, sehingga prosesnya digambarkan sebagai perjuangan berat untuk membuktikan perubahannya. Kontras dengan ini, BA menunjukkan reintegrasi yang relatif lebih mulus, dengan cepat mendapatkan kembali peran keagamaan positif di komunitasnya sebagai imam dan pendiri Rumah Quran, didukung oleh kedekatan emosional serta rekam jejaknya di daerah asal,

meskipun ia tetap dalam pengawasan pihak keamanan. Sementara itu, data yang diberikan tidak secara eksplisit merinci pengalaman stigma atau peran reintegrasi nyata S di masyarakat. Meskipun demikian, secara umum, semua mantan narapidana terorisme menghadapi potensi stigma negatif, dan bagi mereka yang berhasil berintegrasi, upaya membuktikan perubahan melalui tindakan nyata dan kontribusi positif kepada masyarakat menjadi krusial. Selain itu, identitas dan aktivitas keagamaan memainkan peran sentral dalam proses reintegrasi, di mana kemampuan untuk mengisi peran yang bermanfaat secara keagamaan dapat sangat memfasilitasi penerimaan kembali mereka.

d. Faktor Perubahan Ideologi

Perubahan ideologi pada individu yang pernah terlibat dalam gerakan radikal tidak lepas dari dinamika status sosial yang mereka alami. Setelah keluar dari kelompok ekstremis, posisi sosial mereka sering kali mengalami pergeseran, baik dalam bentuk penurunan status karena stigma masyarakat maupun peningkatan status saat berhasil membangun kembali peran positif di lingkungan sosialnya. Tekanan sosial yang mereka hadapi, seperti penolakan atau pengucilan, dapat menjadi dorongan kuat untuk merefleksikan ulang identitas dan keyakinan ideologis mereka. Sebaliknya, dukungan dari keluarga, masyarakat, dan negara melalui program deradikalisasi dapat membantu mereka memperoleh kembali tempat yang layak di masyarakat. Dengan demikian, perubahan ideologi tidak hanya merupakan proses internal, tetapi juga erat kaitannya dengan upaya individu dalam menyesuaikan diri dengan status sosial barunya, serta kebutuhan untuk diterima kembali sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas.

1) Disonansi Kognitif

Ketegangan batin berupa disonansi kognitif yang dialami oleh individu yang pernah terlibat dalam kelompok radikal tidak

hanya dipicu oleh pertentangan antara ideologi dan realitas empiris, tetapi juga oleh perubahan status sosial keagamaan mereka. Dalam kelompok radikal, mereka sering menempati posisi yang dianggap lebih tinggi secara religius, misalnya sebagai mujahid atau ustadz versi kelompok. Status ini memberi mereka rasa superioritas moral dan keagamaan. Namun, ketika mulai mempertanyakan kekerasan terhadap sipil, konflik internal, atau melihat kemanusiaan dalam sudut pandang yang berbeda. Posisi religius yang selama ini menopang identitas mereka mulai terguncang. Ketika keyakinan lama tidak lagi sesuai dengan realitas moral dan spiritual yang mereka alami, disonansi kognitif pun muncul. Dengan demikian, pergolakan ideologis ini juga mencerminkan krisis dalam status sosial keagamaan mereka, antara mempertahankan posisi dalam hierarki kelompok atau menurunkan status demi rekonsiliasi batin dan kebenaran yang lebih luas.

Ketegangan ini menjadi titik awal bagi proses evaluasi terhadap kebenaran ideologis yang dipegang. Bagi sebagian mantan anggota kelompok ekstremis, disonansi kognitif muncul melalui refleksi selama masa penahanan (N1.4), interaksi dengan individu yang berbeda pandangan (N1.78), atau bahkan dari pengalaman langsung melihat dampak destruktif dari tindakan terorisme (N1.74). Dengan demikian, disonansi kognitif menjadi pintu masuk penting dalam proses dekonstruksi ideologi radikal menuju pemahaman yang lebih damai dan inklusif.

Pengalaman pribadi yang intens dan menyakitkan menjadi titik balik dalam proses perubahan ideologi (N1.109). Ia mulai merasakan ketidaksesuaian antara keyakinan lama yang mengagungkan kekerasan atas nama agama dengan kenyataan pahit yang dihadapinya. Disonansi kognitif mulai muncul ketika AF

menyaksikan secara langsung akibat dari aksi terorisme yang ia ikuti. Dalam wawancara, ia menyampaikan,

> "Ada itu, beberapa peristiwa dan pengalaman pribadi yang sangat mempengaruhi perubahan pikiran saya. Salah satu peristiwa paling signifikan adalah saat saya menyaksikan sendiri dampak destruktif dan kehancuran yang diakibatkan oleh aksi terorisme yang saya ikuti. Melihat begitu banyak nyawa yang hilang dan keluarga yang hancur membuat saya mulai meragukan jalan yang saya tempuh." (N1.74)

AF tidak hanya melihat kerusakan fisik, tetapi juga dampak emosional dari para korban yang tak berdosa. Hal ini menimbulkan perasaan bersalah dan keraguan terhadap kebenaran jalan yang selama ini ia tempuh. Ia mengakui,

> "Pengalaman saya selama masa tahanan di Filipina juga memberikan waktu untuk refleksi mendalam tentang tindakan saya dan dampaknya." (N1.129)

Refleksi ini terus bergema selama ia menjalani masa hukuman di Filipina, di mana ia memiliki lebih banyak waktu untuk merenungkan masa lalunya dan berdialog dengan sesama tahanan yang juga mulai mempertanyakan ideologi ekstrem mereka (N1.133). Proses refleksi yang mendalam selama di penjara memperkuat keyakinannya bahwa kekerasan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. AF menyampaikan,

> "Saya merasa Tindakan yang saya lakukan ini tidak benar, banyak teman saya yang ditangkap dan menjadi DPO. Disitu Saya mulai menyadari bahwa tindakan kekerasan yang saya lakukan bukanlah jalan yang benar dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya." (N1.5)

Kesadaran ini berkembang seiring interaksi sosial yang suportif dan pengaruh lingkungan baru yang lebih reflektif. Situasi ini menandai terjadinya disonansi kognitif yang berujung pada pemutusan hubungan ideologis dengan kelompok lamanya (N1.110). Ia kemudian mulai meninggalkan cara pandang radikal

dan mencari pemahaman Islam yang lebih damai dan rahmatan lil ‘alamin.

Pengalaman serupa dialami oleh BA, meski dimulai dari dorongan yang lebih praktis dan kontekstual. Keterbatasan hidup yang dirasakan, baik secara ekonomi maupun intelektual, menjadi pemicu awal munculnya keraguan terhadap jalur ideologis yang ia anut.

> “Lah saya bilang ini kalau saya mengikuti sistem ini, lama-lama saya semakin bodoh dan semakin engak punya duit ini.” (N2.144)

Titik balik muncul ketika ia ditahan di Rutan Cikeas (N2.168), tempat di mana diskusi dan membaca menjadi aktivitas utama yang membuka cakrawala berpikirnya dengan sesama tahanan lain yang banyak lulusan S2 dari yaman (N2.171).

> “Ya termasuk e banyaknya buku-buku yang kita baca di cikeas waktu itu, banyak buku yang kita baca yang itu memberikan pembandingan, pembanding pemahaman kita selama ini.” (N2.165)

Melalui diskusi dengan sesama tahanan, ia mulai melihat jalan alternatif yang lebih realistis dan konstruktif, dengan fokus pada pendidikan dan pekerjaan sebagai sarana untuk berubah. Disonansi antara ideologi dan kenyataan hidup inilah yang akhirnya membentuk kesadaran baru akan pentingnya perubahan.

Hal serupa dialami oleh narasumber S, yang sebelumnya memegang erat pemahaman dari kitab Aljami sebagai satu-satunya kebenaran (N3.81). Kitab ini, menurutnya, dianggap hampir suci oleh sebagian kelompok, sehingga tidak ada ruang untuk mempertanyakan atau membandingkannya (N3.83).

> "akhirnya mulailah rontok ini pemahaman saya tentang aljami dalam tanda Petik kitab hampir Suci kan gitu, Jadi mereka itu bagi mereka hampir hampir suci itu akan akan enggak ada pembandingnya.." (N3.84)

Namun, dalam proses interaksi dengan pihak lain terutama selama berada di penjara ia mulai mendapatkan bantahan, yaitu argumen atau penjelasan yang mengkritisi atau memperlihatkan kelemahan dari ajaran yang diyakininya (N3.167). Bantahan ini tidak langsung membuatnya berubah, tapi menjadi titik balik penting yang mengguncang keyakinannya dan membuatnya mempertanyakan ulang apa yang selama ini ia anggap benar (N3.83).

Perubahan ini tidak datang secara instan, melainkan melalui proses diskusi dan dialog di dalam penjara yang membuka pikirannya terhadap referensi dan pemahaman baru dalam Islam (N3.168). Ia menyebut pengalaman diskusi tersebut sebagai pencerahan, yang perlahan-lahan meruntuhkan keyakinan terhadap doktrin lama.

Disonansi kognitif mulai terasa ketika ia menyadari bahwa ajaran yang selama ini diyakini tidak tahan uji jika dibandingkan dengan sumber-sumber lain dalam Islam yang lebih luas dan moderat. Dengan begitu, pengalaman narasumber S memperkuat gambaran bahwa perubahan ideologis sering kali bermula dari keretakan kecil dalam keyakinan, yang kemudian tumbuh menjadi dorongan kuat untuk mencari pemahaman baru yang lebih rasional dan inklusif.

Secara keseluruhan, disonansi kognitif menjadi titik awal krusial bagi individu untuk mengevaluasi kembali kebenaran ideologis yang dianut. pemicunya dapat bervariasi, mulai dari pengalaman traumatis langsung (AF), keterbatasan ekonomi dan intelektual (BA), hingga keraguan terhadap doktrin yang diyakini (S). perbedaan pemicu disonansi kognitif menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang tak tertahankan antara keyakinan lama dengan realitas atau informasi baru. Persamaan utama terletak pada hasil

akhirnya, yaitu pemutusan hubungan ideologis dengan kelompok radikal dan pencarian pemahaman yang lebih inklusif. Perbedaannya terletak pada faktor eksternal yang memicu disonansi tersebut dan menjadi "pintu masuk" bagi setiap individu untuk memulai refleksi kritis.

2) Atribusi eks narapidana teroris

Perubahan ideologi dalam konteks deradikalisasi sangat berkaitan erat dengan pembentukan kembali status sosial keagamaan mantan narapidana terorisme. Mekanisme atribusi yakni cara individu menafsirkan pengalaman, kegagalan, atau peristiwa masa lalu menjadi kunci dalam proses ini karena melalui atribusi, eks napiter mulai mengidentifikasi sumber kesalahan dalam pemahaman agama yang sebelumnya mereka anut. Ketika kegagalan aksi atau konflik internal dalam jaringan radikal diatribusikan pada kekeliruan ideologis atau distorsi ajaran agama, maka individu mulai melakukan rekonstruksi keagamaan yang lebih moderat.

2. 1. Atribusi terhadap kegagalan organisasi

Perubahan ideologi kerap dimulai dari rasa kecewa terhadap realitas gerakan yang dijalani. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi dan janji-janji ideologis terbukti hampa, muncul perenungan mendalam mengenai arah perjuangan. Bagi sebagian mantan pelaku, kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan menjadi titik balik untuk mempertanyakan kebenaran ideologi yang selama ini diyakini.

Kekecewaan terhadap ketidakmampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemicu awal refleksi ideologis. Narasumber

mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam jaringan tidak hanya gagal memberikan pemenuhan spiritual, tetapi juga menjerumuskannya dalam kondisi ekonomi dan intelektual yang stagnan. Ia menyatakan,

> "Lah saya bilang ini kalau saya mengikuti sistem ini, lama-lama saya semakin bodoh dan semakin engak punya duit ini." (N2.144)

Ketiadaan solusi konkret dari organisasi membuatnya mengambil inisiatif untuk keluar dan mencari jalan sendiri, dengan dua opsi: memperoleh pekerjaan atau mengakses pendidikan. Namun karena situasi internal yang tidak kondusif, ia memutuskan untuk bertahan hidup secara mandiri di luar system (N2.150), hingga akhirnya menjadi imam masjid di Muhammadiyah Sampang, Madura (N2.151). Proses ini menandai pergeseran penting, di mana ketergantungan pada gerakan digantikan dengan kemandirian dan keterlibatan baru dalam komunitas keagamaan yang lebih inklusif.

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa ketiadaan solusi konkret dari organisasi radikal menjadi faktor kunci yang mendorong individu untuk mengambil inisiatif keluar dan mencari jalan mandiri, baik melalui pekerjaan maupun pendidikan.

2. 2. Atribusi terhadap pengalaman pribadi

Perjalanan ideologis seseorang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pribadinya. Interaksi dengan pihak yang selama ini dianggap musuh, perlakuan manusiawi dari aparat, atau tekanan sosial yang dialami keluarga dapat membuka celah dalam keyakinan yang selama ini dianggap absolut. Dalam banyak kasus,

pengalaman emosional ini menjadi pemantik perubahan persepsi terhadap kawan, lawan, dan bahkan terhadap misi perjuangan itu sendiri.

Kesadaran untuk berubah kerap tumbuh dari pengalaman pribadi yang reflektif dan emosional. Narasumber menegaskan bahwa posisinya sebagai mantan anggota kelompok ekstremis memberinya tanggung jawab moral untuk membantu orang lain yang masih berada dalam lingkaran yang sama.

> "Saya memiliki tanggung jawab besar untuk membantu mereka yang terjebak dalam kelompok ekstremis. Saya pernah berada dalam posisi mereka dan tahu sulitnya keluar dari lingkaran kekerasan dan kebencian," (N1.27)

Proses perubahan yang ia alami bukan semata karena tekanan, melainkan merupakan hasil dari kombinasi pengalaman pribadi, dukungan keluarga, dan keterbukaan terhadap perspektif baru (N1.127). Interaksi dengan ulama yang terlibat dalam program deradikalisasi menjadi titik balik penting (N1.142). Mereka menyampaikan pemahaman Islam yang penuh kasih sayang dan toleransi, yang berbeda jauh dari narasi kekerasan yang sebelumnya ia anut. Tidak hanya itu, sikap humanis dari petugas pemasyarakatan dan dukungan penuh dari keluarganya semakin memperkuat keyakinannya untuk menjalani kehidupan yang lebih damai dan konstruktif (N1.7). Ia pun percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah ketika berada dalam lingkungan yang mendukung, serta mendapatkan bantuan dan bimbingan yang tepat.

Proses atribusi terhadap pengalaman pribadi yang dialami narasumber menunjukkan pentingnya dimensi psikologis dan sosial dalam perubahan ideologi. Ketika individu mengalami keterbukaan terhadap narasi alternatif, terutama melalui interaksi dengan figur-figur yang kredibel dan bersikap empatik, maka rekonstruksi makna atas pengalaman hidup pun menjadi mungkin. Dalam konteks ini, peran lingkungan sosial yang suportif seperti keluarga dan tokoh agama moderat berfungsi sebagai social mirror yang memungkinkan individu merefleksikan ulang keyakinan lamanya. Selain itu, narasumber menunjukkan bahwa perubahan tidak semata-mata bersifat internal, melainkan dipengaruhi pula oleh pengalaman eksternal yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, seperti kebaikan hati, penerimaan, dan penghargaan terhadap martabat. Hal ini mendukung teori atribusi dalam psikologi sosial, bahwa perubahan perilaku dan sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh cara individu menafsirkan sebab dari pengalaman yang mereka alami. Oleh karena itu, pengalaman pribadi yang dikaitkan dengan penerimaan, pembelajaran, dan empati menjadi fondasi penting dalam transformasi dari ideologi kekerasan menuju narasi yang lebih damai dan konstruktif.

2. 3. Atribusi terhadap kesalahan penafsiran agama

Banyak individu yang terlibat dalam gerakan radikal berangkat dari keyakinan bahwa mereka tengah membela Islam. Namun seiring waktu, sebagian mulai meninjau ulang dalil dan penafsiran agama yang selama ini dijadikan rujukan. Ketika muncul kesadaran bahwa ada kekeliruan dalam cara memahami ajaran, proses

rekonstruksi ideologis pun dimulai, mengarah pada pandangan yang lebih moderat dan reflektif terhadap teks agama.

Atribusi terhadap pemahaman Islam menjadi titik balik penting dalam proses perubahan ideologi mantan narapidana teroris. Melalui diskusi dengan sesama narapidana terorisme serta akses terhadap literatur keislaman yang lebih beragam selama di penjara, AF mulai membangun kerangka pemahaman baru terhadap ajaran Islam. Ia menyadari bahwa Islam tidaklah sempit dalam penafsiran, melainkan kaya akan nilai-nilai rasionalitas, kedamaian, keadilan, dan toleransi. Sebagaimana yang diungkapkan AF,

> "Pandangan saya tentang penerapan Islam yang rasional adalah bahwa Islam itu harus dipahami dan diterapkan dengan menggunakan akal dan kebijaksanaan. Islam mengajarkan perdamaian, toleransi, dan keadilan. Maka dari itu, Kekerasan dan terorisme tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya." (N1.1)

Kesadaran ini diperkuat oleh pembacaan kritis terhadap berbagai referensi yang menunjukkan bahwa suatu kata atau konsep dalam Islam dapat dimaknai secara lebih luas dan tidak Tunggal (N1.10). Proses intelektual dan spiritual ini mengarah pada pembentukan identitas keagamaan yang lebih inklusif dan menjauhi kekerasan, serta mendorong untuk mulai mencari peran yang konstruktif dalam masyarakat (N1.11). Transformasi ini mencerminkan proses internalisasi nilai-nilai baru yang diperoleh melalui refleksi kritis, pengalaman personal, dan keterlibatan dengan diskursus keagamaan yang lebih terbuka.

Penguatan pemahaman Islam yang moderat tidak hanya lahir dari pengalaman pribadi dan bacaan individu, tetapi juga dari latar belakang pendidikan dan lingkungan intelektual yang mendukung. Seperti yang disampaikan oleh BA, pemikiran moderat di lingkungan Jamaah Islamiyah mulai berkembang karena sebagian anggotanya merupakan lulusan pondok pesantren yang terbiasa dengan proses kajian dan pembelajaran mendalam (N2.159). Ia menekankan bahwa pemahaman keagamaan tidak hanya diperoleh melalui doktrin semata, tetapi melalui proses belajar yang terus menerus, interaksi dengan ulama, serta keterbukaan terhadap berbagai literatur Islam klasik maupun kontemporer (N2.164).

> "Ya termasuk waktu saya di Sampang itu karena saya belajar ya dengan Kiai Prenduan Kiai Zarkasyi Namanya, beliau lulusan lulusan lulusan ini lulusan Al-Amien-nya bukan Tijaniyahnya jadi ya termasuk keluarga Prenduan itu. Cuman saya belajar termasuk saya belajar bagaimana ee mengenal kitab-kitab meskipun lewat itu lewat Maktabah Shamila jadi apa namanya ee buku-buku digital itu loh belajar di situ Belajar diskusi kan jadi banyak interaksi nah ini." (N2.163)

Proses ini menegaskan bahwa pembentukan pemikiran Islam yang inklusif dan toleran sangat dipengaruhi oleh akses terhadap sumber pengetahuan dan ruang-ruang dialog keagamaan yang sehat. Atribusi terhadap pemahaman Islam yang moderat ini menjadi fondasi penting dalam meninggalkan ideologi kekerasan serta membangun komitmen untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Transformasi pemahaman keagamaan juga dipengaruhi oleh keterpaparan terhadap sumber

informasi yang lebih luas dan historis. Narasumber S mengungkapkan bahwa proses refleksi dan pembaruan pemikiran keislamannya dipicu oleh akses terhadap literatur yang membuka wawasan, terutama saat berada di Cikeas dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

> "jadi Iya makanya Ketika saya di di mana Di cikeas Di PMJ itu kan ada buku buku nah termasuk buku yang bagus yang saya baca itu eh bukunya Ahmad suryanegara api sejarah Ahmat Siapa sih? yang api sejarah lah satu dua itu melihat sejarah Indonesia dari sisi ee Islam dan kaum muslimin di Indonesia perjuangannya para ulama para santri mendirikan negara ini." (N3.113)

Salah satu buku yang memberikan dampak signifikan baginya adalah Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara, yang menyoroti peran ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan serta pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (N3.112). Melalui narasi sejarah tersebut, S menyadari bahwa negara ini didirikan melalui kesepakatan yang melibatkan para ulama dan tokoh Islam yang memahami konteks sosial, politik, dan keagamaan bangsa. Pemahaman ini menjadi titik balik dalam persepsinya terhadap NKRI (N3.115), yang sebelumnya dikonstruksikan sebagai entitas yang bertentangan dengan Islam.

Selain itu, pengalaman berdiskusi secara terbuka mengenai isu-isu keagamaan selama masa pembinaan menjadi ruang penting bagi proses klarifikasi pemahaman keagamaan (N3.177). Atribusi terhadap pemahaman Islam yang historis dan inklusif inilah yang memperkuat keyakinan untuk melepaskan narasi-narasi kekerasan dan menggantinya dengan penghargaan

terhadap peran ulama dalam membangun peradaban bangsa secara damai dan bermartabat (N3.182).

Perubahan ideologi di kalangan mantan narapidana terorisme menunjukkan adanya proses atribusi yang signifikan terhadap pemahaman Islam yang lebih moderat, rasional, dan kontekstual. Proses ini terjadi seiring terbukanya ruang dialog, akses terhadap literatur alternatif, serta perjumpaan dengan tokoh agama yang mengedepankan pendekatan damai dalam berislam. Pentingnya diskusi dan pembacaan literatur di dalam penjara mampu mengarahkan pada kesadaran baru akan pentingnya menggunakan akal sehat dalam memahami ajaran Islam. Baginya, kekerasan tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang sejatinya mengajarkan kasih sayang dan toleransi.

e. Perubahan Pandangan Terhadap Konsep Ideologi

Perubahan Pandangan Terhadap Konsep Ideologi" berfokus pada transformasi cara berpikir mantan narapidana teroris terhadap nilai-nilai yang sebelumnya mereka anut, seperti jihad, takfir, dan konsep negara Islam. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan pergeseran pemahaman semata, tetapi juga berkaitan erat dengan proses internalisasi nilai baru yang lebih moderat dan inklusif. Transformasi ideologis ini memiliki kaitan erat dengan pembentukan status sosial keagamaan para mantan narapidana, karena pandangan keagamaan yang mereka yakini menjadi dasar utama dalam membangun kembali identitas, posisi sosial, serta peran mereka di tengah masyarakat. Dengan demikian, perubahan dalam cara pandang terhadap ideologi radikal menjadi titik pijak penting dalam proses reintegrasi sosial dan redefinisi peran keagamaan mereka di lingkungan pasca-hukuman.

1) Konsep Jihad

Salah satu konsep sentral dalam ideologi kelompok radikal adalah jihad. Dalam narasi kelompok ekstrem, jihad sering direduksi menjadi perjuangan bersenjata dan kekerasan terhadap apa yang mereka anggap sebagai musuh Islam, baik berupa negara, individu, maupun sistem pemerintahan seperti demokrasi. Pemaknaan sempit ini menjadi dasar pembenaran atas tindakan kekerasan dan teror yang mereka lakukan. Namun seiring dengan pengalaman hidup, proses refleksi, dan keterlibatan dalam program deradikalisasi, beberapa mantan pelaku mengalami pergeseran makna terhadap konsep ini. Jihad tidak lagi dimaknai secara eksklusif sebagai perang fisik, tetapi bergeser menjadi perjuangan moral, spiritual, dan sosial yang lebih damai. Perubahan ini menunjukkan adanya transformasi ideologis yang mendalam, sekaligus membuka ruang untuk pendekatan Islam yang lebih rahmatan lil ‘alamin.

Salah satu transformasi paling signifikan terkait konsep jihad dapat dilihat dari pengalaman AF, mantan anggota Jamaah Islamiyah. Ia mengungkapkan bahwa pada masa lalu, jihad dipahami secara sempit sebagai perjuangan fisik melawan musuh Islam melalui Tindakan kekerasan dan terorisme (N1.130). Pandangan tersebut dibentuk oleh doktrin radikal yang ditanamkan secara sistematis oleh kelompok ekstremis, yang menekankan aspek konfrontatif dan militan dari ajaran Islam (N1.131).

Seiring berjalannya waktu, AF mengalami perubahan mendasar dalam cara pandangnya. Melalui proses refleksi terhadap pemahaman Islam yang lebih moderat, ia mulai melihat jihad dari perspektif yang lebih holistic (N1.132).

Af mengatakan ;

> “Pandangan tentang Jihad,pada waktu dulu Saya memahami jihad secara sempit sebagai perjuangan fisik melawan musuh Islam, sering

> kali melalui kekerasan dan terorisme. Pandangan ini didasarkan pada doktrin radikal yang saya terima dari kelompok. Kalau sekarang Saya memahami jihad dalam konteks yang lebih luas dan damai. Jihad sekarang saya maknai sebagai perjuangan pribadi untuk menjadi manusia yang lebih baik, berkontribusi positif kepada masyarakat, dan melawan nafsu dan kejahatan dalam diri sendiri." (N1.142)

Perubahan pandangan terhadap konsep jihad menjadi salah satu indikasi penting dari proses transformasi ideologis yang dialami oleh mantan anggota kelompok radikal. AF memaknai jihad sebagai upaya batin untuk menjadi manusia yang lebih baik, melawan hawa nafsu, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Jihad tidak lagi dipandang sebagai peperangan fisik, melainkan sebagai perjuangan spiritual dan sosial yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian.

Selanjutnya, pandangan narasumber BA mengenai konsep jihad juga mengalami pergeseran yang signifikan. Sebelumnya, pemahamannya banyak dibentuk oleh materi askari (militer) dan pendidikan tarbiah di lingkungan pesantren yang menggunakan rujukan dari Kitab Al-Jihad Sabiluna serta pemikiran tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb (N2.68). Narasi yang dibangun dalam proses kaderisasi tersebut menempatkan jihad sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi umat Islam, termasuk dalam konteks Indonesia (N2.70). Sebagaimana dijelaskannya ;

> "Ya kalau Askari kan di sana pertama ada materi namanya ee materi al-jihad sabilun kitab al-jihad sabiluna jadi jihad itu sebagai jalan yang kita tempuh, maknanya untuk melakukan perubahan terhadap kondisi kaum muslimin di sini tidak dijalani kecuali jihad ya kan.." (N2.67)

Di lingkungan pondok, ia diajarkan bahwa NKRI hanya bisa mendekat kepada nilai-nilai Islam melalui jalan jihad (N2.71). Namun, seiring waktu dan pengalaman, narasumber mulai melihat jihad dari sudut pandang yang lebih rasional dan terukur (N2.129). Ia menekankan pentingnya aspek manajemen dalam jihad, termasuk

kemampuan untuk mengendalikan situasi dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak kebablasan (N2.131).

Dalam refleksinya ia menyatakan,

> "Maka semestinya kalau kita mampu memulai jihad kita harus mampu mengakhiri Kapan kita Mulai dan kapan kita akhiri itu harus kita punya kemampuan manajerial di situ." (N2.130)

Pernyataan tersebut menekankan bahwa jihad bukan hanya soal keberanian untuk memulai perjuangan, tetapi juga memerlukan kecakapan untuk menentukan kapan perjuangan tersebut harus diakhiri. Ini menunjukkan bahwa jihad diposisikan sebagai suatu proses yang memerlukan perencanaan strategis dan evaluasi berkelanjutan, bukan sekadar tindakan emosional atau impulsif (N2.229).

Pelaksanaan jihad idealnya disertai dengan kemampuan manajerial, yakni kemampuan untuk mengelola waktu, strategi, sumber daya, serta dampak sosial-politik dari aksi tersebut (N2.230). Dengan kata lain, jihad bukan hanya soal ideologi, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan aksi secara bijaksana. Ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari jihad yang bersifat dogmatis menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan rasional.

Berdasarkan pernyataan narasumber S, dapat dilihat bahwa pemahaman terhadap konsep jihad mengalami proses yang lebih terstruktur dan kontekstual. Dalam pandangannya, jihad tidak dimaknai sebagai aksi kekerasan spontan, melainkan sebagai langkah lanjutan setelah proses dakwah dan dilakukan saat waktu yang tepat dan atas dasar pertimbangan siapa yang layak melaksanakannya (N3.50). Narasumber menegaskan bahwa jihad di kelompoknya lebih difokuskan untuk menolong umat Islam yang

terzalimi di berbagai wilayah konflik seperti Suriah, Afghanistan, Ambon, dan Poso (N3.52).

Prinsip al-iwā' wa an-nuṣrah (perlindungan dan pertolongan) menjadi landasan dalam memahami jihad sebagai bentuk solidaritas dan kewajiban moral terhadap sesama muslim (N3.134), yang dijalankan melalui doa, harta, atau tenaga. Pemahaman ini merujuk pada ayat-ayat dalam surat At-Taubah dan Al-Anfal, yang menekankan pentingnya hijrah, jihad, dan pertolongan (N3.135).Namun, narasumber juga mengkritisi pemahaman yang keliru dalam kelompok radikal takfiri seperti ISIS, yang menjadikan jihad sebagai tujuan akhir, bukan sarana.

Ia menyatakan

> "mereka mati syahid itu tujuan yang jadi salah ya di situ, sehingga apa mereka nyari mati padahal jihad itu adalah wasilah kan kalau bisa dakwah Ya sudah dakwah aja." (N3.474).

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya pergeseran pemahaman dari interpretasi jihad yang ekstrem menuju perspektif yang lebih moderat dan kontekstual. Dalam pemahaman yang lebih matang dan mendalam, jihad bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana (wasilah) untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam Islam (N3.474). Kesalahan yang sering terjadi, terutama pada kelompok yang cenderung berpaham takfiri seperti ISIS, adalah menjadikan jihad dan kematian syahid sebagai tujuan utama (N3.472). Pemahaman ini menyimpang dari metode dakwah Nabi Muhammad SAW yang menekankan tahapan dalam menyampaikan Islam, mulai dari dakwah secara damai, tawaran perlindungan atau jizyah, hingga perlawanan jika diserang (N3.476). Ketika jihad dijadikan satu-satunya jalan, tanpa melalui tahapan dakwah, maka itu menunjukkan penyimpangan serius. Karena itu, jika kondisi memungkinkan, berdakwah secara damai dan menyentuh hati jauh

lebih diutamakan daripada menjadikan jihad sebagai sarana untuk mencari kematian.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, penelitian ini mengungkap adanya pergeseran pemahaman yang signifikan mengenai konsep jihad dari interpretasi yang sempit, eksklusif, dan berorientasi kekerasan menuju pemahaman yang lebih inklusif, kontekstual, dan berorientasi perdamaian. Perubahan ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga memengaruhi cara mereka mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Pandangan Terhadap NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai entitas politik dan sosial sering kali menjadi objek kritik dalam narasi kelompok radikal, khususnya yang memiliki orientasi ideologis transnasional. Dalam kerangka ideologi radikal, NKRI dipandang sebagai sistem thaghut sebuah tatanan yang dianggap bertentangan dengan hukum Allah karena berdiri di atas asas demokrasi, nasionalisme, dan hukum buatan manusia. Pandangan ini tidak hanya menolak legitimasi negara, tetapi juga menyerukan pembentukan sistem alternatif berbasis syariat Islam secara menyeluruh. Namun demikian, proses perubahan ideologi yang dialami oleh para mantan pelaku terorisme menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam memaknai keberadaan dan fungsi NKRI.

Pandangan ekstrem terhadap NKRI juga berakar dari interpretasi sempit terhadap ajaran Islam, khususnya dalam hal penerapan syariat, amr ma'ruf nahi munkar, dan konsep keummatan seperti ahlussunnah wal jamaah. Narasumber AF menggambarkan bahwa saat masih aktif dalam jaringan radikal, ia meyakini bahwa syariat harus ditegakkan secara total dan keras, bahkan jika harus melalui cara-cara kekerasan.

> “Saat masih menjadi bagian dari kelompok radikal, pandangan saya tentang penerapan syariat, amr ma’ruf nahi munkar, dan ahlussunnah wal jamaah sangat sempit dan keras. Saya memandang penerapan syariat harus dilakukan secara total dan keras, tanpa toleransi terhadap perbedaan pendapat. Kami percaya bahwa syariat harus diterapkan dengan kekerasan jika perlu, untuk memaksakan apa yang kami anggap sebagai hukum Tuhan yang mutlak. ” (N1.88)

Pemahaman seperti ini tidak jarang menempatkan negara sebagai entitas yang harus ditentang karena dianggap tidak menerapkan hukum Tuhan secara utuh (N1.89). Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa dalam menjalankan prinsip amar ma’ruf nahi munkar, kelompoknya membenarkan penggunaan intimidasi demi menegakkan nilai-nilai yang mereka anggap benar, tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia dan keragaman sosial di Indonesia (N1.90). Namun, seiring proses refleksi dan transformasi ideologis, AF kini memahami bahwa pendekatan terhadap syariat dan moralitas publik harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan mengedepankan nilai-nilai persatuan serta penghormatan terhadap konteks masyarakat (N1.93).

> “Saya memahami bahwa penerapan syariat harus dilakukan dengan hikmah dan kebijaksanaan, serta menghormati keragaman dan konteks sosial budaya masyarakat. Amr ma’ruf nahi munkar harus dilaksanakan dengan cara yang lembut dan bijaksana, serta ahlussunnah wal jamaah harus dipahami dalam semangat inklusivitas dan persatuan umat,” (N1.94)

Penerapan syariat Islam dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin) harus dijalankan dengan mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat (N1.95). Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah, yaitu bahwa tujuan utama syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dalam konteks amr ma’ruf nahi munkar, penggunaan cara-cara yang lembut dan bijaksana mencerminkan esensi dakwah Islam yang mengedepankan akhlak, bukan kekerasan.

Selain itu, pemahaman terhadap Ahlussunnah wal Jamaah dalam semangat inklusivitas dan persatuan umat menandakan pergeseran dari pendekatan eksklusif-sektarian menuju paradigma yang lebih terbuka dan moderat (N1.96). Sikap ini bukan hanya lebih relevan dalam konteks negara demokratis yang pluralistik, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam merawat harmoni sosial dan memperkuat integrasi umat Islam dengan struktur negara kebangsaan.

Pandangan ini turut diperkuat oleh narasumber BA yang melihat NKRI bukan sebagai entitas yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan sebagai bagian dari jamaatul muslimin sebuah representasi komunitas umat Islam yang sah dalam perspektif syar'i. Dalam wawancaranya, BA menyampaikan bahwa

> "NKRI itu bagian daripada sebuah lembaga yang harus kita besarkan karena NKRI itu kalau bahasa syar'inya kan itu jamaatul muslimin." (N2.191)

Pernyataan ini menandai penolakan terhadap pemaknaan sempit istilah jamaah yang sebelumnya hanya dimaknai sebagai organisasi eksklusif, dan sebaliknya mendorong pemahaman bahwa jamaah juga dapat bermakna daulah atau negara (N2.194). Ia melanjutkan dengan refleksi kritis terhadap sikap sebagian pihak yang menyederhanakan konsep daulah dengan mengatakan bahwa ;

> "Kalau bisa bermakna Daulah, NKRI ini sebuah Daulah. Lah sekarang mau hukumi NKRI ini Daulah Islam atau Daulah kafir? Padahal tanda-tanda keislaman di NKRI ini sangat banyak." (N2.195)

Pernyataan tersebut membantah tuduhan takfiri terhadap NKRI, serta mencerminkan suatu bentuk rekonsiliasi antara identitas keagamaan dengan identitas kebangsaan. Transformasi pemikiran ini menggambarkan pergeseran ideologis dari eksklusivisme menuju penerimaan terhadap realitas sosial-politik yang lebih kompleks,

serta menguatkan posisi Islam sebagai kekuatan yang konstruktif dalam membangun peradaban bangsa.

Pergeseran pandangan terhadap NKRI tidak terjadi secara linear. Beberapa individu dalam jaringan radikal justru menempatkan sistem negara seperti demokrasi sebagai musuh utama, karena dianggap bertentangan secara esensial dengan prinsip Islam. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa demokrasi merupakan sistem yang menyerahkan pembuatan hukum kepada manusia, bukan kepada Allah, sehingga dikategorikan sebagai sistem thaghut atau kufur. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber S,

> "kalau mereka mau harusnya Kan ya legowo (menerima), ternyata ini setidaknya berarti ini ranahnya ijtihad, ijtihad kan berarti satu ijtihad tidak bisa mengalahkan ijtihat yang lain, Monggo milih-milih sendiri, jadi menetapkan demokrasi contohnya di Indonesia itu Jadikan musuh bersama musuh utama di Indonesia yang dibahaskan itu demokrasi, karena Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang bukan sistem Islam kan begitu kan memang memang apa namanya eh core utamanya kan di situ." (N3.392)

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya dinamika pemahaman dalam menyikapi sistem demokrasi di Indonesia yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (N3.393). Meskipun disadari bahwa masalah ini berada dalam ranah ijtihad yakni wilayah perbedaan pendapat yang sah dalam Islam tetapi tetap muncul kecenderungan untuk mengedepankan sikap antagonistik terhadap demokrasi. Dalam pandangan tersebut, demokrasi bukan hanya diposisikan sebagai sistem politik yang berbeda, tetapi bahkan dikategorikan sebagai musuh utama yang harus dilawan karena tidak bersumber dari ajaran Islam (N3.394).

Meskipun pengakuan terhadap ijtihad semestinya membuka ruang toleransi terhadap perbedaan pendapat, dalam praktiknya tetap terjadi penguatan posisi ideologis yang menolak keberadaan

demokrasi sebagai sistem yang sah dalam konteks negara Muslim seperti Indonesia (N3.397). Hal ini mencerminkan ketegangan antara nilai inklusivitas dalam diskursus keislaman dan kecenderungan eksklusivitas ideologis dalam penilaian terhadap negara

S menyatakan :

> "jadi itu yang nggak mungkin dari saya sendiri waktu itu, enggak kepikiran sampai segitu. Oh, ternyata begitu caranya, dikafirkan dulu jadi ada legitimasi untuk memberontak dan akhirnya mendirikan negara sendiri." (N3.340)

Narasi takfir ini kemudian menjadi pintu masuk untuk menghalalkan pemberontakan terhadap negara, didukung oleh interpretasi keagamaan yang sempit dan selektif, termasuk pemanfaatan pendapat ulama seperti Ibnu Taimiyah dalam konteks yang tidak sesuai dengan realitas Indonesia (N3.293). Dalam penjelasannya, narasumber mengungkapkan bahwa pandangan semacam ini awalnya diperoleh dari berbagai fatwa dan bacaan di penjara, termasuk fatwa tentang Negeri Mardin yang menyebutkan bahwa suatu wilayah tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai negara kafir meskipun tidak menerapkan syariat secara formal.

> "Saya dapati di penjara… ada suatu wilayah yang oleh Ibnu Taimiyah tidak ditetapkan sebagai negara Islam, cuma tidak juga sebagai negara kafir. Padahal di situ tidak diterapkan syariat Islam tapi penduduknya mayoritas Islam." (N3.358)

Pemahaman baru ini membuka ruang bagi evaluasi kritis terhadap pendekatan ideologis yang sebelumnya dianut. Narasumber menegaskan bahwa setelah menelaah sejarah pendirian negara Indonesia, ia menyadari bahwa NKRI merupakan hasil konsensus para ulama dan tokoh Islam.

> "Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan memang disepakati… melibatkan para ulama yang paham agama, paham fikih, tafsir, dan sebagainya." (N3.345)

Hal ini berkonsekuensi pada munculnya kesadaran bahwa mengkafirkan negara justru bertentangan dengan prinsip ijma' dan semangat ukhuwah yang dijaga oleh para pendiri bangsa. Sikap ini diperkuat dengan penyesuaian terhadap prinsip waqi' dalam penetapan hukum, yakni mempertimbangkan realitas sosial dan historis dalam pengambilan fatwa. Narasumber menambahkan,

> "banyaklah fatwa-fatwa yang di sana dibawa ke sini… tapi dia enggak sesuai waqi'. Kalau fatwa kan harus sesuai waqi'." (N3.351)

Dengan demikian, transformasi pandangan ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang kontekstual, inklusif, dan bersandar pada realitas kebangsaan, sehingga Islam tidak diposisikan secara oposisi terhadap negara, melainkan sebagai kekuatan moral yang dapat berkontribusi dalam membangun peradaban bangsa.

Pandangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami pergeseran signifikan di kalangan mantan pelaku ekstremisme. Pada masa lalu, sebagian besar dari mereka memandang NKRI sebagai entitas yang tidak Islami karena tidak menerapkan hukum syariat secara formal. Narasi ini diperkuat oleh pemahaman yang menyederhanakan ayat-ayat tentang penegakan din dan konsep khilafah, serta interpretasi literal terhadap ayat "Inil hukmu illa lillah". Dalam konstruksi ideologis tersebut, demokrasi dianggap sebagai sistem thaghut karena menyerahkan pembuatan hukum kepada manusia, yang oleh sebagian kelompok diklaim sebagai bentuk kekufuran.

Namun seiring waktu, beberapa di antara mereka mulai melakukan refleksi kritis dan menemukan bahwa pendekatan takfir terhadap negara justru melahirkan legitimasi untuk pemberontakan yang merusak tatanan sosial. Kesadaran ini muncul dari kajian ulang terhadap teks-teks keagamaan dalam konteks sosial-politik

Indonesia, termasuk melalui rujukan pada fatwa-fatwa ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah tentang wilayah yang tidak sepenuhnya menerapkan syariat, namun tetap tidak serta-merta dikafirkan. Mereka mulai memahami bahwa NKRI merupakan hasil ijma' atau konsensus para ulama dan tokoh bangsa, baik dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, yang sepakat membentuk negara berdasarkan semangat kebersamaan dan kemaslahatan.

Pergeseran ini menandai transisi dari pendekatan eksklusif menuju pemahaman yang lebih inklusif dan kontekstual. NKRI tidak lagi dilihat sebagai musuh ideologis, melainkan sebagai rumah bersama yang dapat diisi nilai-nilai Islam melalui jalan dakwah yang damai dan dialog konstruktif. Dengan demikian, integrasi antara identitas keislaman dan kebangsaan menjadi lebih mungkin dan produktif dalam kerangka negara demokratis yang pluralistik.

3. Pembahasan

a. Status Sosial Keagamaan Eks Narapidana Teroris

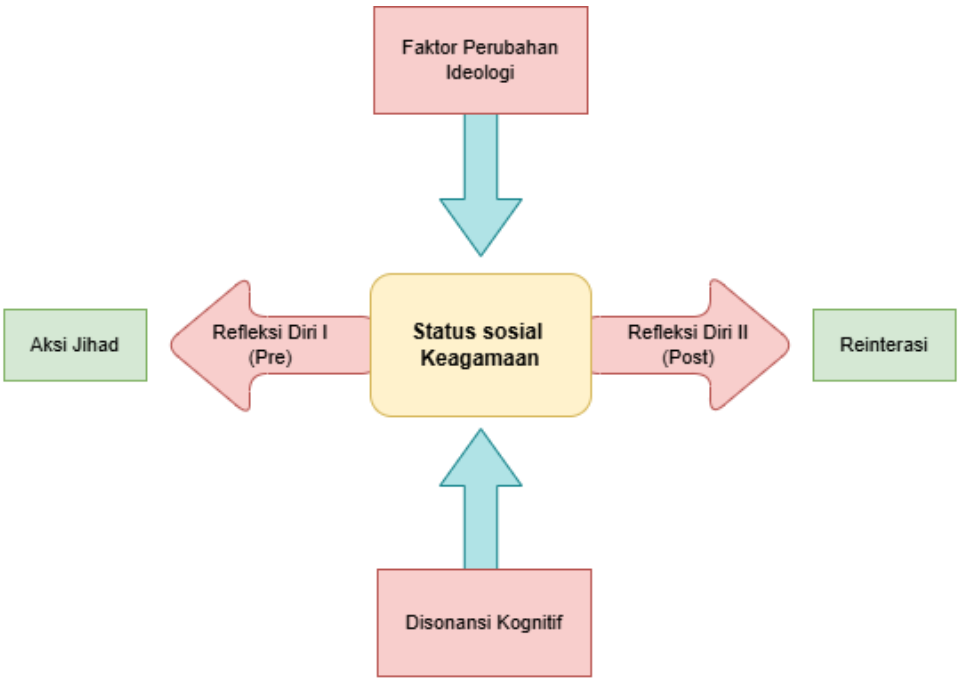

Gambar 5. 1 Proses Terbentuknya Status Sosial Keagamaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa status sosial keagamaan eks narapidana teroris terbentuk melalui proses yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu perubahan ideologi, disonansi kognitif, dan refleksi diri yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah masa hukuman. Perubahan Ideologi terjadi ketika eks narapidana mulai mengkritisi dan merombak kembali keyakinan dan pandangan keagamaan yang sebelumnya dianut secara ekstrem. Proses ini sering dipicu oleh pengalaman refleksi selama masa hukuman, interaksi dengan lingkungan yang berbeda, serta paparan terhadap narasi dan informasi baru yang menantang ideologi lama mereka (Febriyansah et al., 2017). Perubahan ini bukan hanya sekadar penggantian pemahaman, tetapi juga melibatkan proses self-correction atau koreksi diri yang mendalam, di mana mereka menyadari kesalahan dalam pandangan dan tindakan masa lalu, serta mulai membangun pemahaman keagamaan yang lebih moderat dan konstruktif.

Proses perubahan ideologi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan panjang yang penuh pergulatan batin. Misalnya, beberapa mantan narapidana terorisme mengisahkan bagaimana interaksi dengan narapidana lain atau bahkan tokoh agama yang membuka wawasan mereka tentang pluralisme dan nilai-nilai kemanusiaan (Nidhom, 2020). Dalam beberapa kasus, program deradikalisasi yang menyediakan ruang dialog kritis juga berperan penting (Restiana et al., 2021). Mereka diajak menganalisis ulang doktrin-dokstin agama yang selama ini dipahami secara sempit, lalu membandingkannya dengan tafsir yang lebih inklusif

Sementara itu, disonansi kognitif adalah ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika seseorang dihadapkan pada informasi atau pengalaman yang bertentangan dengan keyakinan atau sikap yang selama ini diyakininya. Dalam konteks eks narapidana teroris, disonansi ini muncul ketika mereka mulai menyadari bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan atas nama jihad

sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama yang sesungguhnya (Faizin et al., 2023). Ketidaknyamanan ini mendorong mereka untuk melakukan penyesuaian sikap dan perilaku agar selaras dengan realitas baru yang mereka terima, sehingga memicu perubahan ideologi dan refleksi diri yang lebih mendalam.

Disonansi kognitif ini seringkali menjadi titik balik yang menentukan dalam proses deradikalisasi. Ketika eks narapidana teroris dihadapkan pada bukti-bukti bahwa aksi kekerasan justru menimbulkan penderitaan masyarakat luas, termasuk sesama muslim. Mereka mulai mempertanyakan validitas ideologi ekstrem yang selama ini dipegang. Misalnya, beberapa mantan teroris mengaku mengalami goncangan batin setelah menyaksikan langsung dampak ledakan bom terhadap keluarga korban, termasuk anak-anak dan orang tua tak bersalah (Haryadi, 2016). Pengalaman emosional semacam ini memperburuk disonansi kognitif mereka, karena bertentangan dengan klaim jihad yang selama ini mereka yakini.

Refleksi diri ini terbagi menjadi dua fase, yaitu refleksi diri sebelum (pre) dan refleksi diri sesudah (post). Pada fase awal ini, refleksi diri berkaitan dengan pengalaman dan pemahaman yang terbentuk selama individu terlibat dalam aksi jihad atau aktivitas kelompok radikal. Di tahap ini, individu merenungkan motivasi, nilai, dan keyakinan yang mendasari keterlibatan mereka dalam kelompok tersebut. Refleksi diri pre ini masih dipengaruhi oleh ideologi radikal dan pemahaman yang sempit tentang konsep keagamaan dan perjuangan (Nafsiyah & Wardan, 2024). Proses ini penting karena menjadi dasar bagi bagaimana individu memaknai peran dan status sosial keagamaan mereka dalam kelompok radikal.

Setelah menjalani proses hukuman dan deradikalisasi, individu memasuki fase refleksi diri sesudah (post). Pada tahap ini, refleksi diri berfungsi sebagai evaluasi ulang terhadap keyakinan, sikap, dan perilaku yang sebelumnya dianut (Utomo et al., 2024). Individu mulai mempertanyakan dan menilai kembali ideologi radikal yang pernah diyakini, serta dampak negatif yang ditimbulkan dari keterlibatan mereka. Refleksi diri post ini menjadi momen penting untuk perubahan

ideologi menuju pandangan yang lebih moderat dan konstruktif, sekaligus menjadi landasan bagi proses reintegrasi sosial.

Proses terbentuknya status sosial keagamaan eks narapidana teroris merupakan hasil dari interaksi dinamis antara beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut meliputi perubahan ideologi, refleksi diri, atribusi, dan penyesuaian kognitif. Dalam proses ini, eks narapidana tidak hanya mengalami perubahan pandangan dan keyakinan keagamaan secara internal, tetapi juga secara aktif membangun kembali stautus sosial keagamaan baru yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

b. Transformasi Ideologi Eks Narapidana Teroris

Penelitian ini menunjukkan temuan mengenai pembentukan status sosial keagamaan eks narapidana teroris yang melalui proses kompleks dan dinamis sangat relevan dengan teori perubahan identitas dan kognisi dalam konteks deradikalisasi. Proses perubahan ideologi yang dialami oleh eks narapidana, terutama melalui refleksi diri dan disonansi kognitif, Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori persepsi diri Bem (1967) yang menyatakan bahwa individu memahami sikap dan keyakinannya dengan mengamati perilaku yang dilakukan, sehingga persepsi diri menjadi faktor penting dalam pembentukan sikap sosial. Sejalan dengan konsep cognitive opening yang dikemukakan oleh Wiktorowicz (2005). Dalam teori ini, individu mengalami keterbukaan kognitif ketika keyakinan lama mereka mulai dipertanyakan, biasanya dipicu oleh pengalaman yang mengguncang pandangan dunia mereka, seperti masa hukuman penjara.

Sejalan dengan hal tersebut, Sumarni (2023) mengungkap proses perubahan pemahaman keagamaan yang melewati tiga fase kritis. Pada fase sebelum penahanan, para eks narapidana cenderung memandang agama secara personal tanpa pendalaman kritis, lebih banyak mengikuti pengaruh lingkungan, dan memiliki motivasi menyebarkan ajaran agama tanpa dasar pemikiran yang kuat. Namun, saat menjalani masa hukuman, terjadi titik balik di mana mereka mulai melakukan refleksi diri dan mengembangkan pemikiran kritis, sehingga muncul

kesadaran baru untuk memahami agama secara multiperspektif. Di penjara, mereka juga mulai menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan solidaritas yang lebih luas. Setelah bebas, agama tidak lagi dipahami secara sempit, melainkan diposisikan sebagai falsafah hidup yang dijalani dengan lebih realistis, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Proses transformasi ini dipengaruhi berbagai faktor, seperti kapasitas diri, pengalaman hidup, kepribadian, usia, kondisi kejiwaan, serta lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, proses self-correction yang mendalam mendukung temuan Horgan (2009) yang menekankan pentingnya refleksi kritis dalam proses deradikalisasi. Horgan menyatakan bahwa perubahan ideologi tidak hanya terjadi secara permukaan, tetapi melibatkan rekonstruksi narasi pribadi yang memungkinkan individu membangun kembali identitas keagamaan yang lebih moderat dan konstruktif.

Interaksi dengan lingkungan baru selama masa hukuman juga menjadi faktor penting dalam perubahan ini, Menurut Heider (1958), individu cenderung mengatribusikan penyebab perilaku pada faktor internal seperti kemampuan dan motivasi, atau faktor eksternal seperti situasi dan keberuntungan. Hal ini relevan dengan temuan dalam pembahasan yang menunjukkan bahwa responden mengaitkan keberhasilan mereka dengan usaha pribadi maupun kondisi lingkungan. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Sageman (2014) yang menyoroti peran lingkungan sosial dan paparan terhadap narasi alternatif dalam menggeser pandangan ekstremis. Dengan demikian, proses perubahan ideologi eks narapidana teroris bukan sekadar perubahan kognitif, tetapi juga transformasi sosial yang melibatkan interaksi dan refleksi mendalam.

Fenomena disonansi kognitif yang dialami oleh eks narapidana teroris dalam penelitian ini menguatkan teori psikologis yang dikembangkan oleh Festinger (1957), yang menyatakan bahwa ketidaknyamanan psikologis muncul ketika individu menghadapi informasi yang bertentangan dengan keyakinan atau sikap yang dianut sebelumnya. Dalam konteks deradikalisasi, disonansi ini menjadi titik krusial yang memicu perubahan sikap dan perilaku.

Temuan ini juga sejalan dengan studi Stone & Wood (2018) yang menunjukkan bahwa disonansi kognitif dapat menjadi mekanisme penting dalam proses perubahan ideologi ekstremis, terutama ketika individu mulai menyadari kontradiksi antara tindakan kekerasan yang mereka lakukan dengan nilai-nilai moral dan agama yang lebih universal. Kesadaran ini mendorong mereka untuk menyesuaikan pandangan dan perilaku agar lebih konsisten dengan realitas baru yang mereka terima.

Selain itu, penelitian Horgan (2009) menegaskan bahwa disonansi kognitif dapat memicu refleksi diri yang mendalam, yang pada akhirnya membuka jalan bagi rekonstruksi identitas keagamaan yang lebih moderat. Dengan demikian, disonansi kognitif bukan hanya sekadar ketidaknyamanan psikologis, tetapi juga merupakan proses dinamis yang berperan penting dalam transformasi ideologi eks narapidana teroris.

Pembagian refleksi diri menjadi dua fase, yaitu refleksi diri sebelum (pre) dan sesudah (post) masa hukuman, memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika internal eks narapidana teroris dalam proses perubahan ideologi dan status sosial keagamaan mereka. Fase refleksi diri pre yang masih dipengaruhi oleh ideologi radikal mencerminkan bagaimana individu pada awalnya memaknai keterlibatan mereka berdasarkan narasi dan nilai-nilai kelompok ekstremis, sebagaimana dijelaskan oleh Clark & Sophia (2011) dalam teori radikalisasi yang menekankan pentingnya narasi kelompok dalam membentuk identitas dan motivasi.

Selanjutnya, fase refleksi diri post yang terjadi setelah masa hukuman dan proses deradikalisasi menunjukkan adanya evaluasi kritis terhadap keyakinan dan perilaku masa lalu. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Horgan (2009) dan Bouhana & Wikstrom (2011) yang menekankan bahwa refleksi kritis pasca-penahanan merupakan momen kunci dalam rekonstruksi identitas dan perubahan ideologi menuju pandangan yang lebih moderat. Proses ini juga berperan sebagai fondasi penting dalam reintegrasi sosial, di mana individu mulai membangun

kembali hubungan sosial dan status keagamaan yang lebih konstruktif di masyarakat.

Temuan mengenai proses terbentuknya status sosial keagamaan eks narapidana teroris sebagai hasil interaksi dinamis antara perubahan ideologi, refleksi diri, atribusi, dan penyesuaian kognitif menegaskan pendekatan multidimensional dalam memahami transformasi identitas sosial mereka. Hal ini sejalan dengan teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Mead (1936) dan Goffman (1956), yang menekankan bahwa status sosial terbentuk melalui proses interaksi sosial dan negosiasi makna antara individu dan masyarakat.

Penelitian terdahulu mendukung pentingnya interaksi sosial dan negosiasi makna dalam proses pembentukan status sosial keagamaan eks narapidana teroris. Studi kualitatif oleh Syafiq (2021) meneliti pengalaman mantan anggota Jamaah Islamiyah yang berhasil keluar dari jaringan terorisme dan membangun identitas baru sebagai aktivis perdamaian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan identitas tidak hanya dipicu oleh refleksi diri selama masa penahanan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan aktor-aktor sosial baru, seperti akademisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui proses ini, eks narapidana secara bertahap membangun makna baru tentang diri dan peran sosialnya di masyarakat, yang sejalan dengan prinsip interaksionisme simbolik

Perubahan ideologi dan refleksi diri yang telah dibahas sebelumnya menjadi fondasi internal, sementara atribusi dan penyesuaian kognitif berperan dalam bagaimana eks narapidana menafsirkan pengalaman mereka dan menyesuaikan diri dengan norma sosial baru. Penelitian oleh Maruna (2001) tentang proses reintegrasi mantan narapidana menunjukkan bahwa rekonstruksi identitas sosial yang positif sangat penting untuk diterimanya individu kembali ke masyarakat, termasuk dalam konteks keagamaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto & Sulistyowati, (2017) yang menyatakan bahwa status sosial keagamaan memengaruhi hubungan antarindividu dalam masyarakat, sehingga dapat menjelaskan pola interaksi yang terjadi dalam konteks penelitian ini.

Dengan demikian, pembentukan status sosial keagamaan baru bukan hanya soal perubahan keyakinan pribadi, tetapi juga melibatkan proses sosial yang kompleks di mana eks narapidana aktif membangun dan menegosiasikan identitas mereka agar dapat diterima secara sosial dan keagamaan oleh komunitas yang lebih luas.

c. Dinamika Perubahan Ideologi Eks Narapidana Teroris

Dalam membahas perubahan ideologi yang dialami oleh eks narapidana terorisme (napiter), penting untuk meninjau temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang relevan. Salah satu studi yang menjadi acuan adalah penelitian Wibowo (2023) yang menegaskan bahwa perubahan ideologi terjadi melalui proses refleksi kritis dan interaksi dengan lingkungan baru selama masa hukuman. Temuan ini menekankan pentingnya dinamika internal dan eksternal dalam membentuk ulang pandangan ideologis individu.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa eks napiter mengalami perubahan ideologi yang signifikan melalui proses refleksi diri yang mendalam dan koreksi diri. Proses ini tidak hanya bersifat introspektif, tetapi juga melibatkan pembentukan pemahaman keagamaan yang lebih moderat dan konstruktif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mekanisme perubahan ideologi yang terjadi pada eks napiter tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi juga oleh kesadaran kritis individu terhadap keyakinan dan nilai-nilai yang dianut sebelumnya.

Perbandingan antara temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan dalam hal pentingnya refleksi kritis sebagai kunci transformasi ideologi. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi koreksi diri sebagai langkah aktif dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan moderat, yang mungkin belum secara eksplisit dibahas dalam penelitian terdahulu. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam memahami proses rehabilitasi ideologis, khususnya dalam konteks eks napiter.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh R. C. Kurniawan (2022) menyoroti peran disonansi kognitif sebagai pemicu perubahan sikap dan konformitas terhadap kelompok yang memberikan penguatan nilai baru. Disonansi kognitif, dalam konteks ini, merupakan ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika individu menyadari adanya kontradiksi antara keyakinan atau nilai yang dianut dengan tindakan atau pengalaman yang dijalani sebelumnya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa eks napiter mengalami disonansi kognitif ketika mereka menyadari adanya pertentangan antara tindakan kekerasan yang pernah dilakukan dengan nilai-nilai agama yang sebenarnya dianut. Kesadaran ini memicu proses penyesuaian sikap dan perilaku sebagai upaya mengurangi ketegangan psikologis tersebut. Proses ini juga melibatkan konformitas terhadap kelompok atau lingkungan yang memberikan penguatan terhadap nilai-nilai baru yang lebih moderat dan konstruktif.

Penelitian terdahulu oleh Atiri Laode & Salsabila (2024) menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum, kepribadian, dan kemandirian narapidana. Temuan ini menegaskan bahwa pembinaan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi spiritual, tetapi juga sebagai upaya pembentukan karakter dan kesadaran sosial yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pembinaan keagamaan menumbuhkan kesadaran dan keyakinan pada eks napiter untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta memberikan efek menenangkan batin. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai dampak pembinaan keagamaan dengan menambahkan dimensi psikologis berupa ketenangan batin yang mendukung proses rehabilitasi secara menyeluruh.

Penelitian Alfithon & Syafiq (2021) mengidentifikasi perilaku positif terhadap orang lain dan sikap penolakan kekerasan sebagai indikator keberhasilan dalam proses deradikalisasi. Temuan ini menekankan pentingnya perubahan sikap

yang dapat diamati secara eksternal sebagai tanda bahwa rehabilitasi berjalan efektif, khususnya dalam hal menolak kekerasan dan membangun hubungan sosial yang lebih baik.

Temuan penelitian ini mendukung dan memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa eks napiter tidak hanya menunjukkan sikap menolak ideologi terorisme dan kekerasan, tetapi juga memiliki kesediaan untuk mengakui kesalahan yang pernah dilakukan serta menunjukkan belas kasih terhadap diri sendiri. Aspek pengakuan kesalahan dan belas kasih diri ini menambah dimensi internal yang penting dalam proses perubahan, yaitu kesadaran dan penerimaan diri yang mendalam sebagai fondasi untuk transformasi ideologis dan perilaku.

Penelitian Saloom (2012) menegaskan bahwa perubahan identitas sosial merupakan aspek penting dalam proses reintegrasi dan diterimanya mantan narapidana oleh masyarakat. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada transformasi identitas sosial yang memungkinkan eks napi untuk menyesuaikan diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosialnya.

Temuan penelitian ini melengkapi dan memperdalam pemahaman tersebut dengan menyoroti transformasi identitas keagamaan yang melibatkan rekonstruksi narasi pribadi serta proses self-correction yang mendalam. Proses rekonstruksi narasi pribadi ini mencakup penataan ulang cerita hidup dan keyakinan yang selama ini dianut, sehingga membentuk identitas keagamaan yang baru dan lebih moderat. Sementara itu, self-correction mendalam menunjukkan adanya kesadaran kritis dan evaluasi diri yang intensif sebagai bagian dari perubahan identitas tersebut.

Perbandingan antara kedua temuan ini menunjukkan bahwa transformasi identitas sosial dapat dipahami sebagai proses yang lebih luas, di mana transformasi identitas keagamaan menjadi salah satu komponen penting yang mendukung reintegrasi sosial. Dengan kata lain, perubahan identitas keagamaan yang bersifat internal dan personal, melalui rekonstruksi narasi dan self-correction menjadi fondasi yang memungkinkan eks napiter untuk mengadopsi identitas sosial baru yang diterima oleh masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika status sosial keagamaan eks-narapidana teroris dalam proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Berdasarkan analisis data kualitatif yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan utama yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian.

Pertama, perubahan pikiran dan cara pandang eks-narapidana teroris terhadap kelompok radikal merupakan hasil dari serangkaian faktor kompleks yang saling berinteraksi. Faktor utama pendorong perubahan ini adalah refleksi diri yang mendalam dan munculnya disonansi kognitif, di mana para eks-napiter mulai menyadari kontradiksi antara keyakinan radikal yang mereka anut dengan realitas serta nilai-nilai kemanusiaan yang lebih universal. Kesadaran ini diperkuat secara signifikan oleh pembinaan agama yang moderat dan inklusif yang mereka terima, baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun melalui program-program deradikalisasi. Selain itu, interaksi sosial yang positif dengan lingkungan baru, termasuk sesama narapidana, aparat penegak hukum yang humanis, dan tokoh agama moderat, turut membuka wawasan mereka terhadap pluralisme dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga secara bertahap mereka merombak pandangan ideologis dan meninggalkan paham radikal yang sebelumnya diyakini.

Kedua, proses atribusi eks-narapidana teroris dalam reintegrasi sosialnya, terutama terkait dengan status sosial keagamaan mereka saat berhadapan dengan masyarakat, sangat dinamis. Para eks-napiter berupaya keras untuk membentuk kembali identitas sosial dan spiritual yang positif, membangun narasi pribadi yang baru, dan mengadopsi identitas keagamaan yang lebih moderat dan konstruktif. Dalam menghadapi tantangan reintegrasi, terutama stigma negatif dari masyarakat, mereka cenderung melakukan atribusi eksternal terhadap kesulitan yang dihadapi, seperti

penolakan atau kesulitan mencari pekerjaan, yang dianggap sebagai dampak dari label masa lalu mereka. Meskipun demikian, keberhasilan mereka dalam beradaptasi sering kali diatribusikan secara internal, pada kemauan keras, perubahan diri, atau dukungan dari program rehabilitasi dan keluarga. Strategi adaptasi mereka mencakup partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan lokal yang moderat dan upaya membangun kembali hubungan sosial, yang sering kali berhasil jika didukung oleh penerimaan dan dukungan positif dari keluarga dan komunitas. Dengan demikian, proses atribusi ini menjadi kunci bagaimana eks-napiter memaknai pengalaman reintegrasi mereka, yang pada akhirnya memengaruhi penerimaan dan stabilitas status sosial keagamaan mereka di masyarakat.

2. IMPLIKASI PENELITIAN

a. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman teoritis mengenai perubahan ideologi dan proses deradikalisasi. Dengan mengkaji secara mendalam dinamika transformasi ideologi pada eks narapidana teroris, penelitian ini memperkaya diskursus akademik dengan tiga kontribusi utama yang menyoroti aspek kognitif, reflektif, dan sosial dalam proses deradikalisasi. Kontribusi-kontribusi ini tidak hanya memperkuat landasan teori yang ada, tetapi juga membuka perspektif baru dalam memahami bagaimana perubahan ideologi dapat terjadi secara kompleks dan berkelanjutan dalam konteks reintegrasi sosial.

Penemuan mengenai tahapan refleksi diri yang terjadi sebelum dan sesudah masa hukuman memperluas penerapan teori transformasi belajar Mezirow (1987) dalam konteks deradikalisasi. Sementara Mezirow (1987) menekankan pentingnya refleksi kritis sebagai pemicu utama perubahan perspektif, penelitian ini menunjukkan bahwa refleksi diri pada eks narapidana teroris berlangsung dalam dua fase yang berbeda. Pada fase sebelum hukuman, proses refleksi didominasi oleh

dekonstruksi ideologi radikal yang terjadi melalui pengalaman disorienting dilemma, yaitu situasi yang mengguncang keyakinan dan nilai-nilai lama, seperti konflik nilai yang dialami selama proses hukum. Sedangkan pada fase setelah hukuman, refleksi berfokus pada rekonstruksi identitas melalui mekanisme self-reconciliation, yaitu upaya individu untuk berdamai dengan masa lalu dan membangun identitas baru yang lebih konstruktif (Rummel, 1976). Pola refleksi dua fase ini melengkapi dan memperkaya model perubahan ideologi yang selama ini bersifat linier dalam literatur deradikalisasi, seperti model yang dikemukakan oleh Moghaddam (2005), dengan menawarkan pemahaman yang lebih dinamis dan kompleks mengenai proses transformasi ideologi pada eks narapidana teroris. Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memperdalam kajian tentang bagaimana perubahan ideologi dapat terjadi secara bertahap dan berlapis dalam konteks deradikalisasi.

Penelitian ini juga menguatkan validitas teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Festinger (1957) dalam konteks narapidana teroris. Temuan menunjukkan bahwa disonansi tidak hanya timbul akibat ketidaksesuaian antara keyakinan dan perilaku individu seperti yang dijelaskan dalam eksperimen klasik Festinger, melainkan juga muncul dari ketegangan antara narasi ideologis ekstrem yang dianut dengan realitas empiris yang mereka alami selama masa hukuman. Contohnya, terdapat kontradiksi nyata antara doktrin radikal seperti "jihad sebagai solusi" dengan dampak kekerasan yang mereka alami secara langsung. Kondisi ini menimbulkan konflik internal yang memperkuat disonansi kognitif tersebut. Temuan ini sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh Beauvois & Joule (1996), yang menekankan pentingnya mengkaji fenomena disonansi dalam konteks dunia nyata yang kompleks dan dinamis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana disonansi berperan dalam proses perubahan ideologi eks narapidana teroris.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas aplikasi teori disonansi kognitif ke ranah yang lebih kontekstual dan realistis, khususnya dalam studi deradikalisasi.

Penelitian ini juga menghadirkan sintesis antara teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Blumer (1969) dan teori identitas sosial dari Tajfel & Turner (1979) dalam menjelaskan proses pembentukan identitas keagamaan baru pada eks narapidana teroris. Proses transformasi identitas tersebut tidak hanya terjadi melalui negosiasi makna secara individual, sebagaimana ditekankan dalam interaksionisme simbolik yang menyoroti bagaimana individu membangun makna melalui interaksi sosial, melainkan juga dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika kelompok acuan (reference group) yang menjadi lingkungan sosial setelah masa hukuman, sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh Kelley (1952). Misalnya, partisipan yang berinteraksi dengan mantan teroris lain yang telah mengalami perubahan cenderung mengadopsi narasi keagamaan yang lebih moderat sebagai bagian dari restrukturisasi identitas sosial mereka.

Pendekatan ini memperkaya teori deradikalisasi yang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada faktor-faktor individu dengan menambahkan dimensi sosial dan kelompok, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana identitas keagamaan baru terbentuk dan dipertahankan dalam konteks reintegrasi sosial eks narapidana teroris. Dengan demikian, integrasi kedua teori ini menegaskan pentingnya interaksi sosial dan pengaruh kelompok dalam proses perubahan ideologi dan pembentukan status sosial keagamaan yang berkelanjutan.

b. Implikasi Praktis

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga menawarkan arahan praktis yang penting untuk pengembangan program deradikalisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan mengenai tahapan refleksi diri eks narapidana teroris serta dinamika perubahan ideologi yang kompleks, implikasi praktis ini menekankan perlunya desain program deradikalisasi yang terstruktur secara sistematis, dimulai dari proses refleksi diri yang berjenjang. Selain itu, pendampingan dan evaluasi ulang setelah masa hukuman menjadi aspek krusial untuk memastikan keberlanjutan perubahan sikap dan mencegah kembalinya paham radikal. Tidak kalah penting, pelatihan fasilitator yang kompeten juga menjadi fondasi utama dalam memfasilitasi proses refleksi diri eks narapidana teroris secara efektif. Dengan pendekatan terpadu ini, program deradikalisasi dapat memberikan dukungan yang komprehensif, memfasilitasi transformasi ideologi, serta memperkuat reintegrasi sosial yang positif bagi para eks napiter.

Pada fase pre-hukuman, pendekatan yang digunakan mengadopsi teknik cognitive confrontation sebagaimana dikemukakan oleh Baron (2000), dengan memanfaatkan analisis insiden kritis (critical incident analysis) untuk mengungkap dan mengekspos inkonsistensi serta kontradiksi dalam ideologi radikal yang dianut oleh subjek. Contoh konkret dari penerapan teknik ini adalah penggunaan simulasi interaktif yang dirancang untuk mempertemukan doktrin kekerasan dengan konsekuensi hukum dan sosial yang nyata, sehingga memicu kesadaran kritis dan disonansi kognitif yang dapat menjadi titik awal perubahan sikap.

Sementara itu, pada fase post-hukuman, program deradikalisasi menitikberatkan pada rekonstruksi identitas narasi (narrative identity reconstruction) yang dijelaskan oleh McAdams (2001). Metode yang digunakan adalah life-story interviewing, yaitu wawancara mendalam yang membantu eks narapidana membingkai ulang pengalaman hidup mereka dalam kerangka identitas yang lebih pro-sosial dan konstruktif. Sebagai implementasi praktis, modul pelatihan selama 12 minggu

dengan tema "Reauthoring My Journey" yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan menjadi sarana efektif untuk mendukung proses ini, memberikan ruang bagi peserta untuk merefleksikan perjalanan hidupnya dan membangun narasi baru yang positif.

Dengan pembagian fase yang jelas dan penggunaan teknik yang sesuai pada masing-masing tahap, program deradikalisasi ini tidak hanya memfasilitasi perubahan ideologi secara bertahap dan sistematis, tetapi juga memperkuat proses reintegrasi sosial eks narapidana teroris secara berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya desain program yang responsif terhadap dinamika psikologis dan sosial yang dialami oleh subjek, sehingga hasil deradikalisasi dapat lebih optimal dan tahan lama.Penemuan mengenai peran disonansi kognitif dalam proses deradikalisasi menegaskan pentingnya penerapan sistem pendampingan yang berjenjang dan terintegrasi pada berbagai level untuk mendukung keberhasilan reintegrasi eks narapidana teroris.

Pada level mikro, mekanisme pendampingan dilakukan melalui peer-mentoring oleh eks narapidana yang telah berhasil menjalani proses reintegrasi secara positif. Pendekatan ini mengadopsi Konsep Peer-Mentoring dalam Reintegrasi Sosial Fitriani et al., (2024). Peer-mentoring adalah mekanisme di mana individu yang telah berhasil melewati proses reintegrasi (mentor) mendampingi eks narapidana lain (mentee) dalam menyesuaikan diri kembali ke masyarakat. Model ini menekankan pengalaman langsung, empati, dan dukungan sejawat sebagai kunci keberhasilan. Model ini terbukti efektif dalam memfasilitasi perubahan sikap dan memperkuat komitmen untuk menjauhi paham radikal.

Pada level meso, sistem pendampingan melibatkan kolaborasi struktural antara berbagai pihak yang berperan dalam proses deradikalisasi, seperti petugas pemasyarakatan, psikolog klinis, dan tokoh agama moderat. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pelaksanaan

case conference bulanan yang berfungsi sebagai forum koordinasi dan evaluasi bersama terhadap perkembangan peserta program. Pendekatan multidisipliner ini memungkinkan identifikasi kebutuhan individual secara lebih komprehensif serta penyusunan strategi intervensi yang tepat sasaran, sebagaimana direkomendasikan dalam literatur terkait manajemen kasus dan rehabilitasi sosial (McAdams, 2001).

Sementara itu, pada level makro, pengembangan platform aftercare nasional berbasis teknologi menjadi inovasi penting untuk mendukung keberlanjutan proses deradikalisasi setelah masa hukuman. Contohnya adalah aplikasi Second Chance yang dilengkapi dengan fitur crisis alert dan virtual counseling, yang memungkinkan pemantauan kondisi psikologis peserta secara real-time serta pemberian dukungan psikososial secara cepat dan mudah diakses. Penggunaan teknologi digital dalam layanan aftercare ini sejalan dengan tren global dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk rehabilitasi dan pencegahan kekambuhan, serta memberikan solusi praktis untuk menjangkau eks narapidana di berbagai wilayah dengan sumber daya terbatas (Arntz et al., 2023).

Dengan mengintegrasikan ketiga level pendampingan ini secara sinergis, program deradikalisasi dapat memberikan dukungan yang holistik dan berkelanjutan, memperkuat proses perubahan ideologi, serta meminimalkan risiko kembalinya paham radikal. Pendekatan berjenjang ini juga mencerminkan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas kebutuhan psikososial eks narapidana teroris dalam konteks reintegrasi sosial yang aman dan konstruktif.

Penelitian mengenai interaksi antara fasilitator dan partisipan dalam program deradikalisasi mengarah pada pengembangan kerangka kompetensi fasilitator yang berstandar tinggi dan terstruktur. Kerangka ini menekankan keterampilan inti yang sangat penting untuk memfasilitasi proses perubahan ideologi secara efektif. Salah satu

keterampilan utama adalah penggunaan teknik Socratic questioning, yang berfungsi untuk memicu disonansi kognitif pada partisipan dengan cara mengajukan pertanyaan kritis yang menantang keyakinan lama mereka, sebagaimana dijelaskan oleh (Ding et al., 2024). Teknik ini membantu membuka ruang refleksi dan mendorong perubahan perspektif secara mendalam.

3. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai perubahan ideologi dan proses reintegrasi sosial eks-narapidana teroris, terlihat bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk refleksi diri, pendidikan agama, status sosial keagamaan, serta dukungan komunitas. Untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan dan reintegrasi sosial yang efektif, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan terstruktur. Oleh karena itu, saran-saran berikut disusun sebagai upaya konkret untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi, sekaligus memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran masing-masing demi tercapainya tujuan bersama ;

1. Pengembangan Program Rehabilitasi Terstruktur dan Holistik

   Merancang dan melaksanakan program rehabilitasi yang menggabungkan secara komprehensif aspek psikologis, pendidikan agama, dan sosial sangat penting. Program tersebut harus dirancang untuk mendukung eks-narapidana dalam menjalani proses refleksi diri, transformasi ideologi, serta pembentukan identitas sosial dan keagamaan yang konstruktif dan positif. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi dukungan spiritual dan aspek psikologis dalam program rehabilitasi dapat meningkatkan mentalitas positif dan kesejahteraan narapidana, serta membantu mereka dalam proses perubahan dan reintegrasi sosial secara menyeluruh (Annisa et al., 2024).

2. Peningkatan Pendidikan Agama yang Moderat dan Inklusif

   Perkuat pendidikan agama dalam program rehabilitasi dengan pendekatan yang moderat dan menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan ini harus diarahkan untuk membangun kesadaran hukum dan moral yang mendalam, sekaligus memperkuat status sosial keagamaan yang positif bagi eks-narapidana. Penelitian Murniati (2019) menunjukkan bahwa pembinaan pendidikan agama Islam yang dilakukan secara komprehensif dan moderat, melalui ceramah, pengajian rutin, dan pendampingan spiritual, mampu meningkatkan kesadaran moral dan spiritual narapidana serta memperkuat identitas sosial keagamaan mereka. Pendekatan ini juga didukung oleh kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi dan pesantren untuk memberikan bimbingan agama yang lebih mendalam dan holistik, sehingga membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial eks-narapidana teoris

3. Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Program Rehabilitasi Berkelanjutan

   Pemerintah dan lembaga terkait perlu merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan program rehabilitasi dan reintegrasi, termasuk alokasi sumber daya yang memadai serta mekanisme koordinasi antar lembaga untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Mufti & Riyanto (2023) menegaskan peran strategis Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam rehabilitasi narapidana yang berorientasi pada pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pendekatan psikososial. Studi ini menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai landasan kebijakan yang mengatur rehabilitasi narapidana secara holistik dan berkelanjutan.

4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana teroris sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi ini mencakup penilaian efektivitas metode deradikalisasi, pemantauan proses reintegrasi sosial, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat agar program dapat berjalan optimal dan mendukung keberhasilan reintegrasi mantan teroris ke masyarakat. evaluasi program deradikalisasi narapidana teroris di Indonesia menunjukkan bahwa program tersebut berhasil menurunkan tingkat radikalisasi dan memoderasi pemahaman ideologi, namun menghadapi tantangan signifikan dalam reintegrasi sosial akibat stigma masyarakat. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan meningkatkan efektivitas program melalui kerja sama lintas Lembaga (Brahmana & Subroto, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. (2012). *Sosiologi : skematika, teori dan terapan* (Abdulsyani (ed.)). bumi aksara.

Alex. (2022). *Tangkal Paham Radikalisme, Terorisme Dan Intoleransi Di Kampus, Udinus Berikan Kuliah Umum Kepada Para Aktivis*. Dinus.Ac.Id. https://dinus.ac.id/2022/12/tangkal-paham-radikalisme-terorisme-dan-intoleransi-di-kampus-udinus-berikan-kuliah-umum-kepada-para-aktivis-2/

Alfithon, A. M., & Syafiq, M. (2021). Belas kasih diri pada narapidana kasus terorisme yang menjalani program deradikalisasi. *Jurnal Psikologi Ulayat*, *9*, 67–93. https://doi.org/10.24854/jpu343

Amalia, A. M. C. (2022). *Cognitive Dissonance Theory*. Binus.Ac.Id. https://binus.ac.id/malang/public-relations/2022/04/14/cognitive-dissonance-theory-part-i/

Ananda, R. S. (2022). *Kemensos Bagikan Pengalaman Tangani Eks Napiter dan Anak Terpapar Radikalisme ke Pemerintah Kyrgyztan*. Kemensos.Go.Id. https://kemensos.go.id/kemensos-bagikan-pengalaman-tangani-eks-napiter-dan-anak-terpapar-radikalisme-ke-pemerintah-kyrgyztan

Annisa, L., Sitorus, M., & Daulay, N. (2024). Metode pembinaan agama Islam bagi mantan pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi narkotika khalid bin walid Medan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal …*, *10*(1), 549–556. https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/4484

Atiri Laode, D. S., & Salsabila, W. S. (2024). Dampak Pembinaan Keagamaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Negara Kelas II A. *Arus Jurnal Psikologi Dan Pendidikan*, *3*(1), 1–6. https://doi.org/10.57250/ajpp.v3i1.325

BEM, D. J. (1967). Self-Perception: an Alternative Interpretation of Cognitive Dissonance Phenomena. *Psychological Review*, *74*(3), 183–200. https://doi.org/10.1037/h0024835

Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. *International Journal of Intercultural Relations*, *29*(6 SPEC. ISS.), 697–712. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013

Bouhana, N., & Wikstrom, P. (2011). Al Qai'da-Influenced Radicalisation: A Rapid Evidence Assessment Guided by Situational Action Theory. *Home Office Research, Development and Statistics Directorate*, *97*.

Brahmana, F. C. B., & Subroto, M. (2023). Evaluasi Program Deradikalisasi Narapidana Teroris dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *12*(02). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.20195

Budiarsih. (2023). *Penanganan Terorisme Berdasarkan Keadilan* (S. Setyadji

(ed.)). Untag Surabaya Press.

Clark, M., & Moskalenko Sophia. (2011). Friction: How radicalization happens to them and us. In *Oxford University Press*. https://doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.10

Dodego, S. H. A., & Witro, D. (2020). The Islamic Moderation And The Prevention Of Radicalism And Religious Extremism In Indonesia. *Dialog*, *43*(2), 199–208. https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.375

Ent, M. R., & Gerend, M. A. (2016). Cognitive dissonance and attitudes toward unpleasant medical screenings. *Journal of Health Psychology*, *21*(9), 2075–2084. https://doi.org/10.1177/1359105315570986

Faizin, N., Nuraziza, C. P., Amanda, D., Eideweis, L. A. A., Sawitri, N. D., Ardiyanti, N. R., Safira, R., Azizah, S. N., & Febiana, V. R. (2023). Rekonstruksi Makna Jihad Di Era Digital. *Seminar Pendidikan Agama Islam*, *2*(1), 81–100.

Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Kusuma, R. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Jurnal Unnes*, *Vol.3*(1), 91–108.

Festinger, L. (1957a). *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press.

Festinger, L. (1957b). *An Introduction to the Theory of Dissonance*. stanford university.

Fritz, H. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/10628-000

George H. Mead. (1936). Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. *The Modern Schoolman*, *13*(2), 43–43. https://doi.org/10.5840/schoolman19361328

Goffman, E. (1956). The Presentation of Everyday Life. *Urban Life*, *15*(1), 103–121. https://doi.org/10.1177/009830986015001004

Hafid, W. (2020). Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal). *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, *1*(1), 31. https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v1i1.37

Harmon-Jones, E., & Mills, J. (2019). An introduction to cognitive dissonance theory and an overview of current perspectives on the theory. *American Psychological Association*. https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0000135-001

Haryadi. (2016). Eksistensi Gerakan Politik Negara Islam Di Irak Dan Suriah (Isis) Dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Politik Dan Keamanan Di …. *Transborders*, *1*(1), 1–19. http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5647%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/

5647/4/4. BAB II.pdf

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. John Wiley & Sons Inc.

Hidayat, M., & Husna, S. (2021). Resiliensi Keluarga 'Teroris" Dalam Menghadapi Stigma Negatif Masyarakat & Diskriminasi. *Sosio Konsepsia*, *10*(2), 159–176. https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2389

Horgan, J. (2009). *Walking Away From Terrorism : Accounts Of Disengangement From Radical and Extremist Movements*. Routledge.

Insan, I. (2023). *Pengantar Psikologi Sosial*. Zahir Publishing.

Jabbar, L. A. (2022). *Resepsi Hermeneutik Al-Qur'an Eks Narapidana Teroris atas Ayat-ayat Jihad dan Qital*.

KBBI. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. Kbbi.Web.Id. https://kbbi.web.id/status

Kelley, H. H. (1973). Kelley_The process of causal attribution. *American Psychologist*, *38*(February), 107–128. http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_processes_of_causal_attribution.pdf

Kellina, T. D. (2017). Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan (Studi di BAPAS Kelas 1 Malang). *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf

Kurniawan, A. (2023). Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Gema Keadilan*, *10*(1), 1–11. https://doi.org/10.14710/gk.2023.20072

Kurniawan, R. C. (2022). Pelibatan Mantan Narapidana Teroris (Napiter) Untuk Mencegah Radikalisme Oleh Polri. *Tanggon Kosala*, *2*(2), 381–389.

Lekhawipat, W., Wei, Y. H., & Lin, C. (2018). How internal attributions affect knowledge sharing behavior. *Journal of Knowledge Management*, *22*(4), 867–886. https://doi.org/10.1108/JKM-02-2017-0081

Lestari, G. (2021). Radikalisme Atas Nama Agama dalam Perspektif Intelektual Muda di Tengah Realitas Multikultural. *Khazanah Theologia*, *3*(3), 181–193. https://doi.org/10.15575/kt.v3i3.12723

Lukman, M. (2021). Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara Dari Terorisme. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *2*(2), 679–688. https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.624

Maruna, S. (2001). Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives. *American Psychological Association*. https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/10430-000

Maryam, E. W. (2021). *Buku Ajar Psikologi Sosial Jilid I*. Umsida Press.

https://doi.org/https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-29-4

Mbai, A. (2014). *Dinamika Baru jejaring teror di Indonesia : Dan keterkaitannya dengan gerakan radikalisme transnasional* (A. Kleinsteuber (ed.); 1st ed.). AS Production Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(2), 2425–2438. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026

Murniati. (2019). Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, *2*(3), 1–2. http://etd.uinsyahada.ac.id/5667/1/13 230 0265.pdf

Nafsiyah, F., & Wardan, K. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Radikalisme Di Kalangan Remaja. *Al-Rabwah*, *18*(2), 093–104. https://doi.org/10.55799/jalr.v18i2.530

Najtama, F. (2018). Religiusitas Dan Kehidupan Sosial Keagamaan. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, *9*(2), 421–450. https://doi.org/10.32489/tasamuh.214

Nazer, M. S. M., & Nordin, M. K. N. C. (2021). Sorotan Perkembangan Terorisme Moden: Analisis Hubungan Terorisme Baharu dengan Gerakan Militan Muslim A Review on the Development of Modern Terrorism: An Analysis of the Relationship Between New Terrorism and the Muslim Militant Movement. *Jurnal Usuluddin*, *49*(2), 171–198. https://doi.org/10.22452/usuluddin.vol49no2.6

Nidhom, K. (2020). Konsep Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal Al Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah. *Journal of Indonesian Tafsir Studies*, *01*(1), 30–34.

Nur Afifa, I., Yuni Rahayu, P., Nur, D., Junia Vitaloka, V., Salsabila, S., & Zubaidah. (2023). Dampak Persepsi Bagi Kesehatan Mental Individu. *Jurnal Pendidikan Tematik*, *4*(3), 256–260.

Paamsyah, J., Irawan, H., Feprizon, H., Perdana, M. A., & Jainah, Z. O. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *23*(2), 376. https://doi.org/10.22146/jmh.16193

Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). *Implementasi teori atribusi untuk menilai perilaku kecurangan akuntansi*. *4*(1), 41–66.

Prayitno, S. S., & Alfian, I. N. (2023). Gambaran Stigma Pada Mantan Narapidana Teroris. *JURNAL FUSION Vol 3 No 03, Maret 2023 E-ISSN: 2775-6440 | P-*

ISSN: 2808-7208 Jurnal Homepage Https://Fusion.Rifainstitute.Com, *3*(1,2), 2775–7208.

Putra, D. A., & Rulloh, A. (2023). Model Kepemimpinan Strategis Dalam Menghadapi Radikalisme Dan Terorisme. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *1*(3), 508–519. https://doi.org/10.60126/maras.v1i3.90

Ramadanti, M., Sary, C. P., & Suarni, S. (2022). PSIKOLOGI KOGNITIF (Suatu Kajian Proses Mental dan Pikiran Manusia). *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, *8*(1), 56–69. https://doi.org/10.30863/ajdsk.v8i1.3205

Ranny, Rize Azizi A.M, Eevina Rianti, Sinta Huri Amelia, Maya Nova, Nurva Novita, & Eni Lestarina. (2017). Konsep Diri Remaja Dan Peranan Konseling. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, *2*(2), 40–47.

Restiana, V. L., Susila, A., & Rofieq, A. (2021). Strategi Kebijakan Deradikalisasi Dalam Penanganan Radikalisme Pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Bnpt). *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *12*(2), 95–105. https://doi.org/10.33558/kybernan.v12i2.3143

Robbaniyah, Q., & Lina, R. (2022). Eksplorasi Strategi Kontra Radikalisme pada Santri di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Baz Yogyakarta. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/10.59944/amorti.v1i1.5

Sageman, M. (2014). The Stagnation in Terrorism Research. *Terrorism and Political Violence*, *26*(4), 565–580. https://doi.org/10.1080/09546553.2014.895649

Salim, A. (2022). Perilaku Beragama Dan Dinamika Psikologi Penganut Radikalisme Dan Terorisme (Studi Fenomenologi Eks Napiter Di Yayasan Persadani Jawa Tengah). *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *Mi*, 5–24.

Saloom, G. (2012). Meninggalkan Jalan Teror: Perspektif Teori Identitas Sosial. In *Isu-Isu Mutakhir Peneltiaan Psikologi Sosial* (pp. 49–67).

Santoso, O. R., & Satwika, Y. W. (2019). Hubungan Antara Harga Diri dengan Kesejahteraan Psikologis pada Wanita Menikah yang Bekerja. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, *6*(3), 1–11.

Scott, W. R. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas and Interests*. SAGE Publications.

Sholeh, B., Hutagalung, I. R., Alting, M. G., Wahyudhi, N., Asrori, S., & Sholehuddin. (2018). *Ekonomi kaum muda dan kebijakan kontraterorisme*.

Silalahi, U. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. UNPAR Press.

Soekanto, S. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.

Stone, D. F., & Wood, D. H. (2018). Cognitive dissonance, motivated reasoning, and confirmation bias: Applications in industrial organization. *Handbook of Behavioral Industrial Organization*, *December*, 114–137. https://doi.org/10.4337/9781784718985.00011

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sumarni, S. (2023). *Transformasi Keberagamaan Pascapenahanan : Sebuah Analisis Fase Keagamaan Mantan Sri Sumarni*. *7*(2), 211–226. https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107.2

Sus, V. (2023). *External Attribution: 10 Examples And Definition*. Helpfulprofessor.Com. https://helpfulprofessor.com/external-attribution/

Syafiq, M. (2021). Proses Perubahan Diri Seorang Teroris menjadi Aktivis Perdamaian. *Jurnal Ilmiah Psyche*, *15*(2), 73–92. https://doi.org/10.33557/jpsyche.v15i2.1564

Syihab, M. A., & Hatta, M. (2021). *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. *1*(1). https://advokatkonstitusi.com/penanggulangan-tindak-pidana-terorisme-di-indonesia/

Tejo, A. (2018). *Susahnya para Mantan Teroris Kembali ke Masyarakat (Bagian 2)*. Ngopibareng.Id. https://www.ngopibareng.id/read/susahnya-para-mantan-teroris-kembali-ke-masyarakat-bagian-2-1213575

Utama, F. R., & Rohman, F. (2023). Pendekatan Teori Atribusi Pada Analisis Determinan Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, *12*(1), 43. https://doi.org/10.30659/jai.12.1.43-55

Utomo, P., Asvio, N., & Prayogi, F. (2024). Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK): Panduan Praktis untuk Guru dan Mahasiswa di Institusi Pendidikan. *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, *1*(4), 19. https://doi.org/10.47134/ptk.v1i4.821

Waytz, A. (2009). How the pursuit of status can lead to aggressive and self-defeating behavior. In *The Psychology of Social Status*. www.scientificamerican.com.

Wibowo, H. A. (2023). MODAL SOSIAL EKS NARAPIDANA TERORIS (NAPITER) DALAM PROGRAM DERADIKALISASI DI JAWA TIMUR. *Eprints.Umm.Ac.Id*.

Wiktorowicz, Q. (2005). A genealogy of radical Islam. *Studies in Conflict and Terrorism*, *28*(2), 75–97. https://doi.org/10.1080/10576100590905057

Zumrotus Sholikhah, & Muvid, M. B. M. (2022). Konsep Islam Moderat Sebagai Alternatif Dalam Proses Penanggulangan Paham Radikal Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *5*(4), 115–128. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.324